



# PERUBAHAN RENSTRA 2017-2022

**RENCANA STRATEGIS**  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

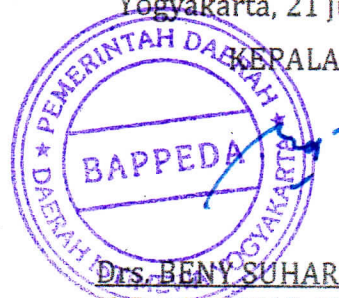
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tersusun. Rencana Strategis (Renstra) pada Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Renstra Bappeda DIY memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan SKPD, Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tujuan, sasaran, Strategis, dan Kebijakan Pembangunan Bappeda DIY, Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif, Indikator Kinerja Bappeda DIY yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD DIY, serta Penutup. Renstra yang sudah disusun akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang diturunkan didalam Rencana Kerja (Renja). Sehubungan dengan adanya penajaman dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan serta akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam meta program perlu dilakukan perubahan renstra tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Penyusunan RKPD Tahun 2022 diperlukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan terhadap kebutuhan perencanaan tahun 2022. Untuk itu, perlu disusun Perubahan Renstra Bappeda DIY.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda DIY. Semoga dokumen Perubahan Renstra Bappeda DIY yang sudah tersusun dapat mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Yogyakarta, 21 Juni 2021



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.  
NIP. 19650512 198602 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Landasan Hukum .....	7
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DIY .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA DIY .....	11
2.2 Sumber Daya BAPPEDA DIY .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
<b>BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA DIY.....</b>	<b>28</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 29 .....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BAPPEDA KAB/KOTA .....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	44
<b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA DIY .....	52
<b>BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>54</b>
5.1 Strategi Dan Kebijakan.....	54
<b>BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB 7 KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>96</b>
<b>BAB 8 PENUTUP .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 2-1.	JUMLAH PEGAWAI BAPPEDA DIY BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	17
TABEL 2-2.	DAFTAR SARANA DAN PRASARANA BAPPEDA DIY TAHUN 2018 .....	17
TABEL 2-3.	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA DIY .....	25
TABEL 3-1.	PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	28
TABEL 3-2.	TUJUAN DAN SASARAN PEMDA DIY 2017-2022 .....	34
TABEL 3-3.	KETERKAITAN VISI, MISI KEPALA DAERAH-WAKIL KEPALA DAERAH DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA .....	35
TABEL 3-4.	FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN BAPPEDA.....	37
TABEL 3-5.	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA DIY BERDASARKAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA.....	39
TABEL 3-6.	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPPEDA DIY BERDASARKAN SASARAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN/KOTA DI DIY BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA.....	39
TABEL 3-7.	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG TERKAIT PELAYANAN BAPPEDA DIY DITINJAU DARI IMPLIKASI RTRW DAN KLHS.....	44
TABEL 3-8.	RUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS .....	47
TABEL 4-1.	TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN/SASARAN BAPPEDA DIY TAHUN 2017-2022 .....	53
TABEL 4-2.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	53
TABEL 5-1.	IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS .....	54
TABEL 5-2.	TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	58
TABEL 6-1.	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAPPEDA DIY .....	62
TABEL 7-1.	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	96

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD.....	6
GAMBAR 2. POSISI RENSTRA PERANGKAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	6
GAMBAR 3. STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DIY .....	14
GAMBAR 4. GRAFIK PEJABAT STRUKTURAL BERDASAR JENIS KELAMIN .....	15
GAMBAR 5. KEBUTUHAN PEGAWAI BAPPEDA DIY .....	16
GAMBAR 6. APLIKASI PERENCANAAN JOGJAPLAN.....	18
GAMBAR 7. APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI PEMDA DIY .....	19
GAMBAR 8. WEBSITE META DATA SPASIAL DAERAH.....	20
GAMBAR 9. APLIKASI PENGELOLAAN DATA STATISTIK DAERAH .....	21
GAMBAR 10. APLIKASI INTERNAL BAPPEDA DIY.....	22
GAMBAR 11. KERANGKA LOGIS META PROGRAM BERDASAR RPJMD DIY 2017-2022.....	61

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

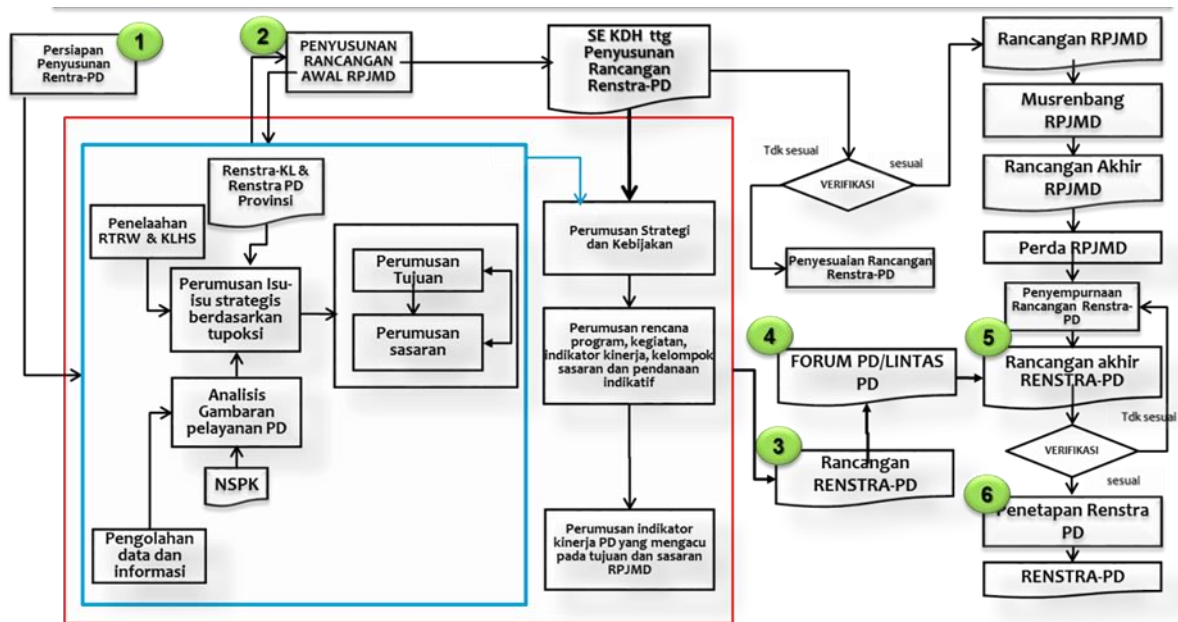
### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

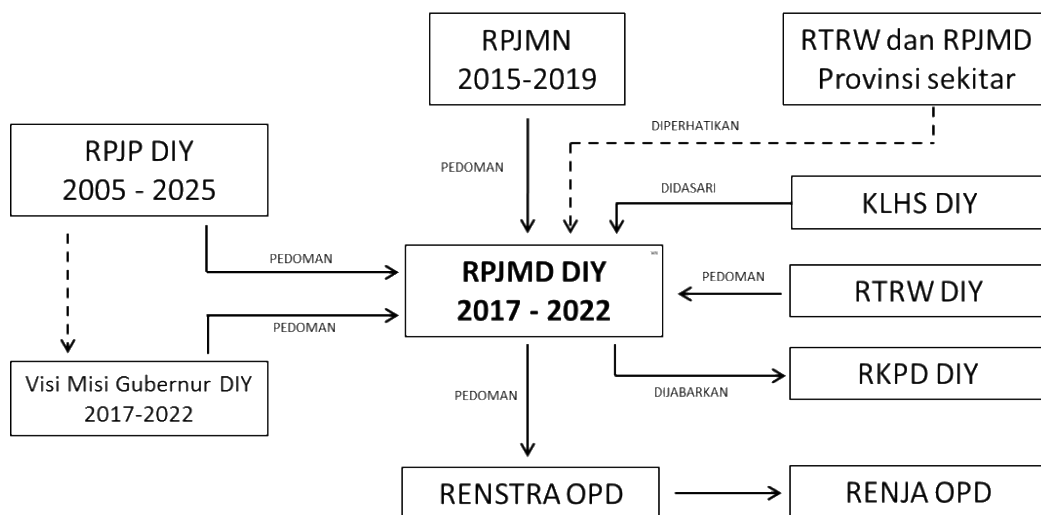
Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan akhir renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Rancangan Akhir Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra Bappeda DIY disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.



**Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD**

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada **Gambar 2** di bawah ini.



**Gambar 2. Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah**

Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KSP/IX/2018 Nomor 67/DPRD/2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan adanya perbaikan dan penajaman kegiatan perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

rangka meningkatkan kualitas perencanaan serta akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan. Nota kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD (343 ayat 2), bahwa perubahan tersebut akibat terdapat kebijakan provinsi (343 ayat 3) dan perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (343 ayat 9).

Berdasarkan hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Penyusunan RKPD Tahun 2022 dengan menyesuaikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diperlukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan terhadap kebutuhan perencanaan tahun 2022 yang perlu diakomodir dalam RKPD Tahun 2022 dan sesuai amanat Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan baru di dalam RKPD ditindaklanjuti dengan penyesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra Bappeda DIY 2017-2022 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);

- 16) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- 17) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- 18) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 20) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 22) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 23) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### **1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

#### **1.3.1 Maksud**

Perubahan Renstra Bappeda DIY 2017-2022 disusun sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappeda DIY setiap tahunnya serta sebagai pedoman bagi seluruh personil di Bappeda DIY dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

#### **1.3.2 Tujuan**

Perubahan Renstra Bappeda DIY 2017-2022 disusun dengan tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
- 2) Sebagai pedoman bagi Bappeda DIY dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- 3) Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun periode Renstra.

### **1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan**

Dasar dilakukannya perubahan Renstra Bappeda adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/8300 tanggal 27 April 2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2017-2022

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Bappeda DIY 2017-2022 adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- a) Latar Belakang;
- b) Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan

### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat gambaran umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

### **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat hasil analisis permasalahan dan hasil analisis isu strategis dalam upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

### **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja perangkat daerah di dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022

### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah

### **BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan sebelum dan sesudah perubahan

### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan periode berikutnya

### **BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB 2**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DIY**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda DIY**

Pada saat Perubahan Rencana Strategis disusun, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Perubahan pertama diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan tugas dan fungsi pada Peraturan Gubernur tersebut adalah :

- 1) Perubahan fungsi pada Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dari “pembinaan, pengoordinasian, dan fasilitasi perencanaan kabupaten/kota dan/atau sinkronisasi perencanaan yang berdimensi keuangan” menjadi “pembinaan, pengoordinasian, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan kabupaten/kota”;
- 2) Penambahan fungsi pada Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan yaitu “pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah”;
- 3) Perubahan fungsi Subbidang Perencanaan Pembangunan dari “penyiapan dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah berdimensi kewilayahan” menjadi “penyiapan dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah”;
- 4) Perubahan fungsi Subbidang Perencanaan Pembangunan dari “penyusunan dan pengoordinasian rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah berdimensi kewilayahan” menjadi “penyusunan dan pengoordinasian rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah”;
- 5) Penghapusan fungsi pada Subbidang Perencanaan Pembangunan yaitu “pembinaan dan pengoordinasian perencanaan Kabupaten/Kota dan/atau sinkronisasi perencanaan yang berdimensi keruangan”;
- 6) Pemindahan fungsi penyiapan bahan sinkronisasi rencana dan program pembangunan, pengelolaan data pembangunan, penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan, penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan, penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengawasan dari subbidang pemerintahan umum ke subbidang administrasi publik;

- 7) Penambahan tugas dan fungsi pada Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu tugas dan fungsi di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 8) Perubahan tugas Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) dari “tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan statistik sektoral untuk meningkatkan persentase rumusan bahan kebijakan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dan persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah” menjadi “tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan statistik sektoral untuk meningkatkan persentase hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah”;
- 9) Perubahan salah satu fungsi BPPSD dari “pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data pembangunan daerah” menjadi “pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data pembangunan daerah yang terdiri dari data geospasial dan non geospasial”;
- 10) Penghapusan salah satu fungsi Subbagian Tata Usaha BPPSD yaitu “pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi”;
- 11) Perubahan tugas Seksi Data dan Statistik dari “melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data geospasial dan data non geospasial”;
- 12) Perubahan salah satu fungsi Seksi Data dan Statistik dari “pelayanan data dan informasi pembangunan daerah” menjadi “pelayanan data dan informasi pembangunan daerah, serta pengembangan sistem informasi data geospasial dan data non geospasial”.

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah untuk kedua kalinya melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan tugas dan fungsi pada Peraturan Gubernur tersebut adalah :

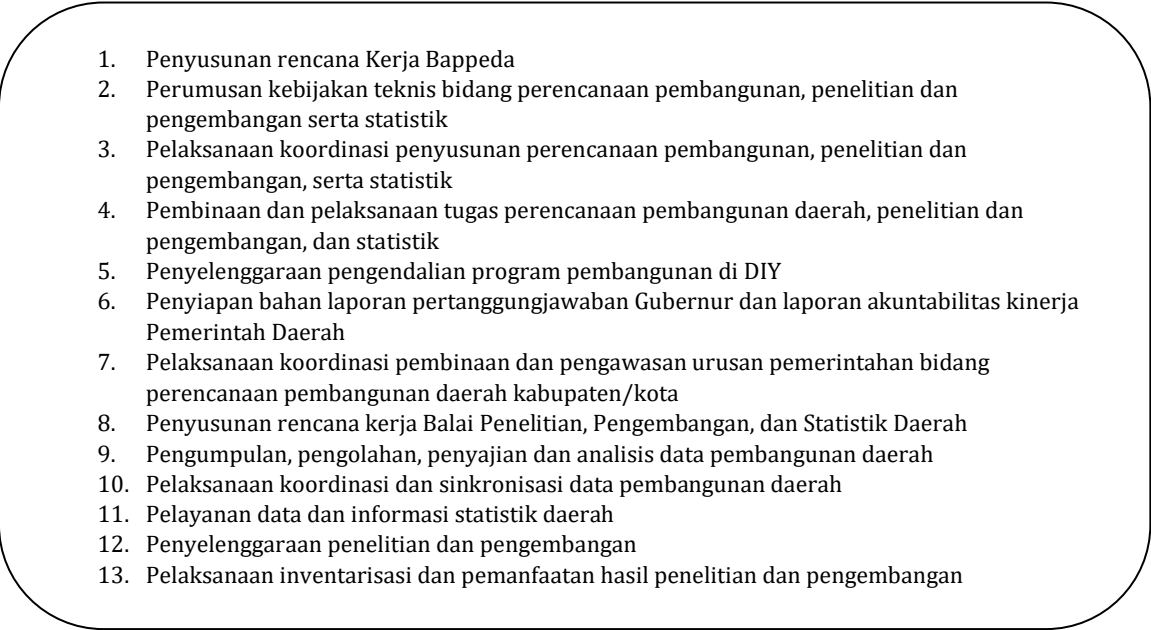
- 1) Perubahan fungsi Bidang Pemerintahan dari penyiapan rencana dan program, pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang paniradya kaistimewan, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan dan penghubung daerah menjadi penyiapan sinkronisasi rencana dan program, pelaksanaan inventarisasi permasalahan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan, dan penghubung daerah;

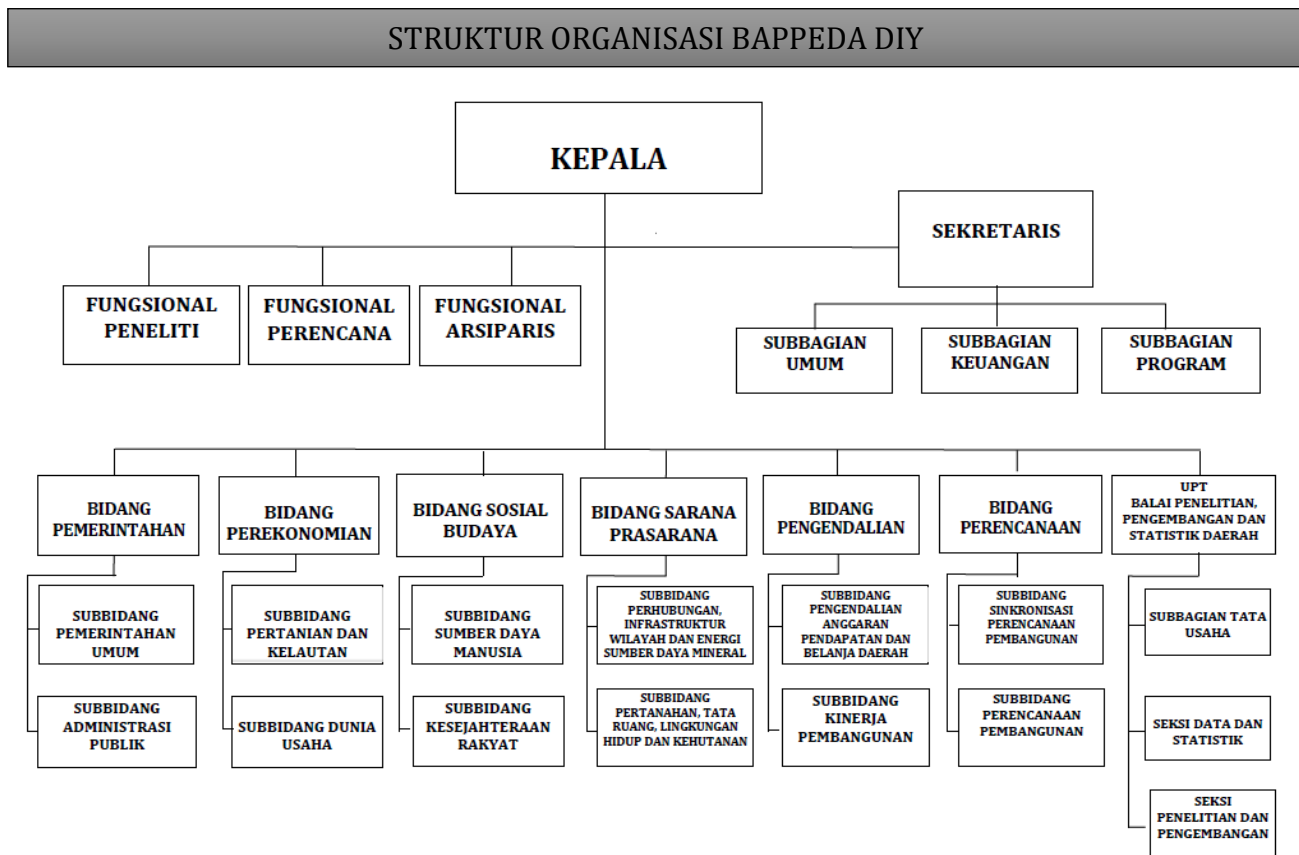
- 2) Penghapusan salah satu fungsi pada Bidang Pemerintahan, Bidang Perekonomian, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang Sarana Prasarana yaitu “pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran”;
- 3) Penghapusan salah satu fungsi Subbidang Pemerintahan Umum, Subbidang Administrasi Publik, Subbidang Pertanian dan Kelautan, Subbidang Dunia Usaha, Subbidang Sumber Daya Manusia, Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral, dan Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu “pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran”;
- 4) Perubahan salah satu fungsi Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) dari “pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan” menjadi “perumusan rekomendasi hasil kelitbangan sebagai bahan rumusan perencanaan pembangunan daerah”;
- 5) Perubahan salah satu fungsi Seksi Penelitian dan Pengembangan dari “pelaksanaan dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan” menjadi “penyiapan bahan rekomendasi hasil kelitbangan yang akan dijadikan bahan rumusan perencanaan pembangunan daerah”;
- 6) Penambahan fungsi Seksi Penelitian dan Pengembangan yaitu “fasilitasi Dewan Penelitian dan Pengembangan”.

Secara garis besar, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang diatur melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 dan 99 tahun 2018, dan diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 dan 14 Tahun 2020, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 107 dan 108 Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut :

- 
1. Penyusunan rencana Kerja Bappeda
  2. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik
  3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik
  4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan statistik
  5. Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di DIY
  6. Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
  7. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
  8. Penyusunan rencana kerja Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah
  9. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data pembangunan daerah
  10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data pembangunan daerah
  11. Pelayanan data dan informasi statistik daerah
  12. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
  13. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

**Gambar 3. Tugas dan Fungsi Bappeda DI**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda terbagi ke dalam struktur organisasi sesuai Gambar 3 berikut :



**Gambar 4. Struktur Organisasi BAPPEDA DIY**

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat. Sedangkan dinamika yang berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politis dan proses teknokratis. Selain itu, aspek yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda saat ini adalah kebijakan pemerintah pusat yang telah ditetapkan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda DIY selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait, dan dari internal selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

## 2.2 Sumber Daya Bappeda DIY

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

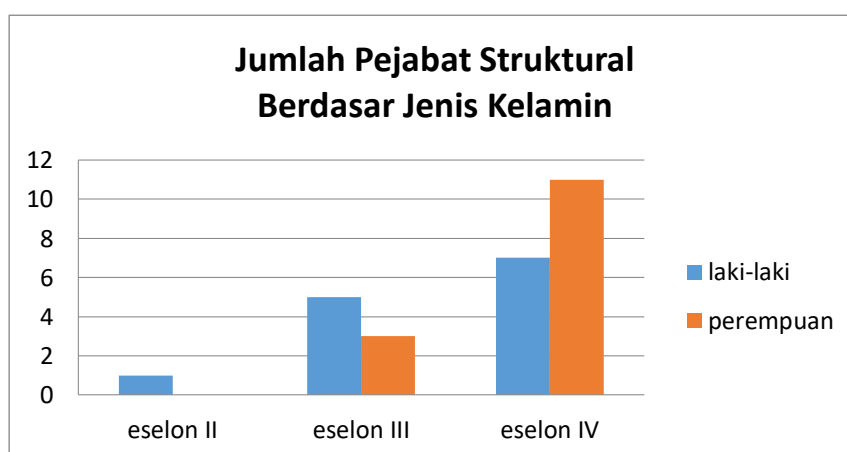
#### 2.2.1.1 Profil Kepegawaian Bappeda DIY

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Profil kepegawaian di Bappeda DIY dikelompokkan menjadi pegawai instansi induk Bappeda dan UPT Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) DIY.

Sumberdaya manusia di Bappeda DIY sampai dengan 31 Desember 2020, tercatat sebanyak 87 pegawai yang terdiri dari 23 orang pejabat struktural, 12 orang pejabat fungsional tertentu, dan 52 orang fungsional umum, sedangkan pegawai yang tercatat di BPPSD DIY sebanyak 20 pegawai terdiri dari 4 Pejabat Struktural, 5 pejabat fungsional tertentu dan 9 pejabat Fungsional Umum. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal.

##### 2.2.1.1.1 Profil Pejabat Struktural Bappeda DIY

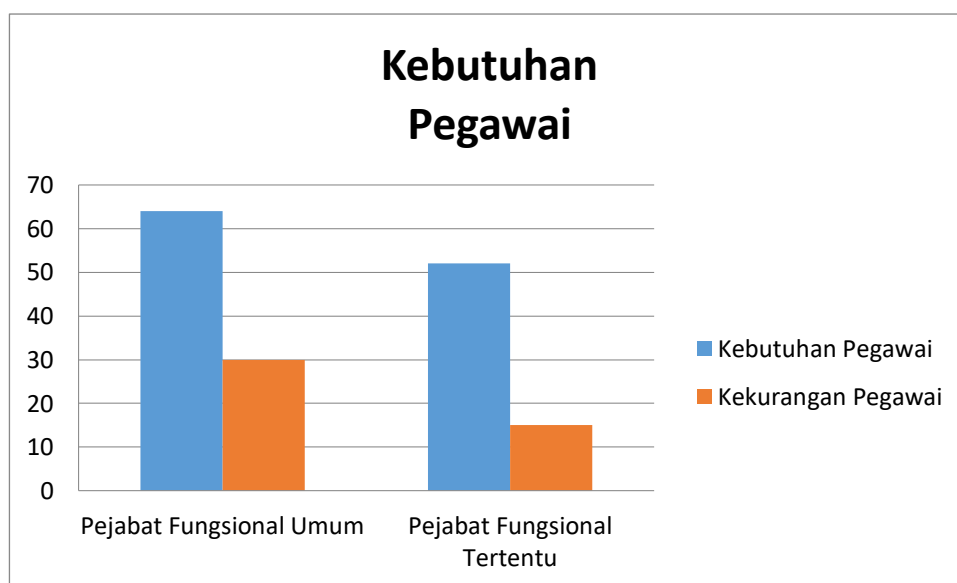
Berdasarkan kondisi kepegawaian per 31 Desember 2020, jumlah pejabat struktural pada Bappeda dan BPPSD DIY sebanyak 27 orang, dengan tingkat keterisian jabatan sebesar 100%, yang terdiri dari pejabat eselon II 1 orang, pejabat eselon III 8 orang, dan pejabat eselon IV 18 orang. Dari jumlah tersebut, distribusi berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut : eselon II laki-laki sebanyak 1 orang, eselon III laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 3 orang, serta eselon IV laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Jumlah pejabat struktural berdasar jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut :



**Gambar 5. Grafik Pejabat Struktural Berdasar Jenis Kelamin**

#### 2.2.1.1.2 Pejabat Fungsional Tertentu Dan Fungsional Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional, kebutuhan pegawai di Bappeda DIY adalah sebagai berikut : 1) Pejabat Fungsional Tertentu : 30 orang, 2) Pejabat Fungsional Umum : 64 orang. Kondisi sampai dengan 31 Desember 2020, Bappeda DIY memiliki 15 orang yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan 52 orang yang menduduki jabatan fungsional umum. Dengan kondisi ini, maka terdapat kekurangan pegawai untuk menduduki jabatan fungsional tertentu sebanyak 12 orang, dan kekurangan pegawai untuk menduduki jabatan fungsional umum sebanyak 12 orang. Untuk BPPSD, kebutuhan jabatan fungsional tertentu telah terisi semua, sedangkan untuk kebutuhan jabatan fungsional umum terdapat kekurangan sebanyak 12 orang. Komposisi kebutuhan pegawai dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:



**Gambar 6. Kebutuhan Pegawai BAPPEDA DIY**

Dalam Rangka memenuhi kebutuhan jabatan fungsional perencanaan, Bappeda DIY telah mengirimkan personil mengikuti diklat-diklat perencanaan sebagai syarat pengangkatan pejabat fungsional perencanaan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai, setiap tahun Bappeda DIY mengajukan penambahan personil. Akan tetapi, terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu adanya penambahan pegawai, sampai saat ini, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda DIY mengupayakan penambahan tenaga non PNS atau Tenaga Ahli yang penempatannya disesuaikan dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda DIY.

### 2.2.1.1.3 Profil Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai Bappeda DIY berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Tabel 2-1.berikut :

**Tabel 2-1. Jumlah pegawai Bappeda DIY berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Sarjana S2	16	16
2	Sarjana S1	19	30
3	Diploma IV	1	0
4	Diploma III/SM (DIII/SM)	3	2
5	SLTA	10	7
6	SLTP	0	0
7	SD	1	0

Jumlah pegawai Bappeda DIY per 31 Desember 2020 pada Tabel 2-1 di atas terdistribusi dalam struktur organisasi Bappeda DIY sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai dan kebutuhan personil.

## 2.2.2 Sarana Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda DIY sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda DIY dan BPPSD DIY dapat dilihat pada Tabel 2-2. berikut :

**Tabel 2-2. Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda DIY per Desember 2020**

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
<b>1.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>11.698.913.658</b>
	a. Alat-alat besar	3 unit	446.104.300
	b. Alat-alat Angkutan	18 unit	2.411.662.342
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.867 unit	6.759.752.016
	d. Alat Studio dan Alat Komunikasi	224 unit	2.075.105.000
	e. Alat Kedokteran dan Kesehatan	3 unit	6.290.000
<b>2.</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	<b>4 unit</b>	<b>4.989.171.200</b>
<b>3.</b>	<b>Jaringan</b>	<b>1 unit</b>	<b>36.567.500</b>
<b>4.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>83.252.840</b>
	a. Buku Perpustakaan	3.206 buku	79.952.840
	b. Barang bercorak	1 unit	3.300.000
<b>5.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>100 unit</b>	<b>9.339.114.325</b>
			<b>26.147.019.523</b>

Sumber : BAPPEDA DIY, 2020



Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda DIY. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

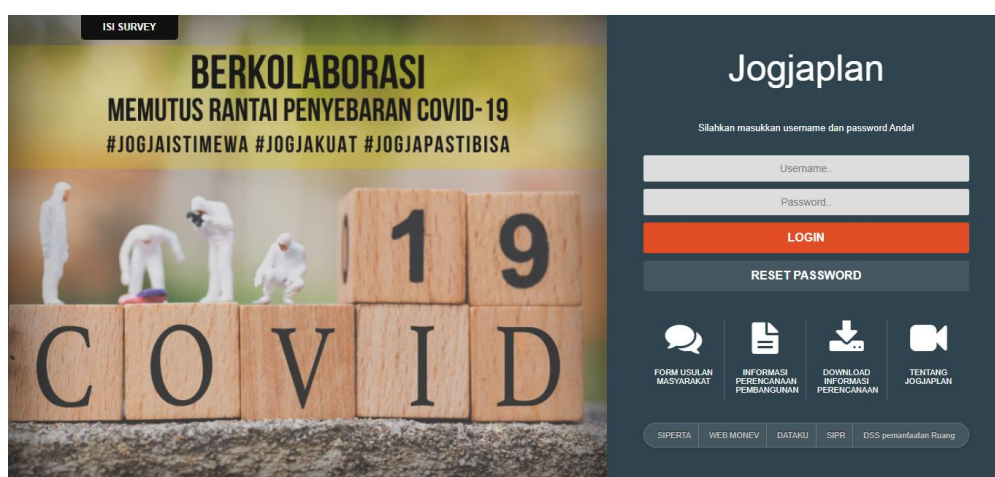
### 2.2.3 Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di DIY. Bappeda DIY selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda DIY membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda DIY sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

#### 2.2.3.1 Jogjaplan

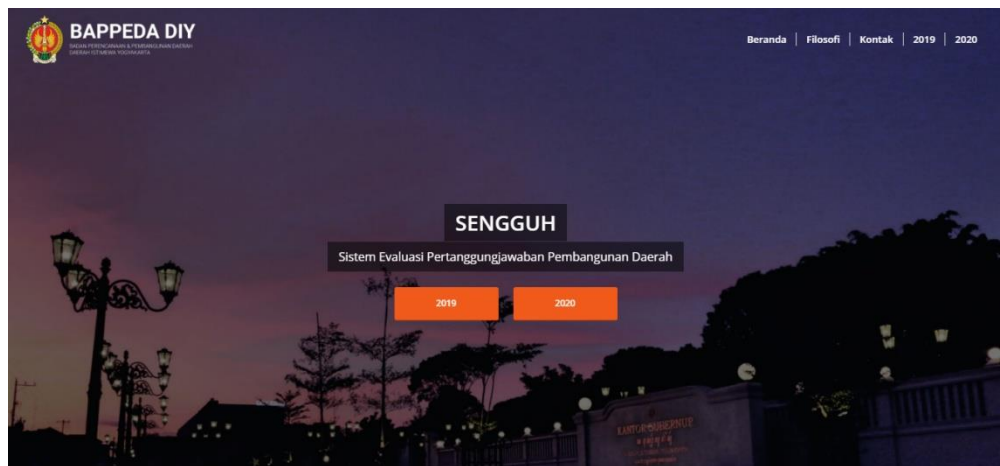
Jogjaplan merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat luas. Jogjaplan dapat diakses melalui [www.jogjaplan.com](http://www.jogjaplan.com). Tampilan Jogjaplan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 7. Aplikasi Perencanaan Jogjaplan

### 2.2.3.2 Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah)

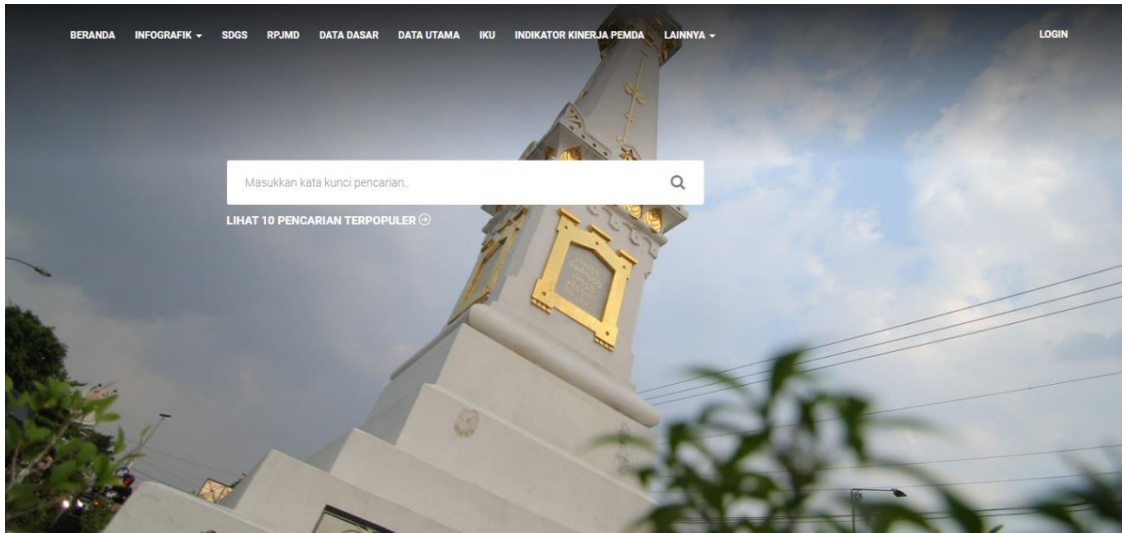
Aplikasi Sengguh membantu pencapaian kinerja Bappeda dalam melaksanakan evaluasi pembangunan daerah. Fitur-fitur dalam Sengguh meliputi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), ESAKIP (E-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Logframe/KAK (Kerangka Acuan Kerja), ROPK (Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan), EMONEV (E-Monitoring dan Evaluasi), PKKI (Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi), Program Strategis, ELKPJ (E-Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur), Lintas Sektor dan Monev APBN (Monitoring Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Sengguh dapat diakses melalui <https://sengguh.jogjaprov.go.id/>. Tampilan Sengguh dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 8. Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah)**

### 2.2.3.3 Dataku

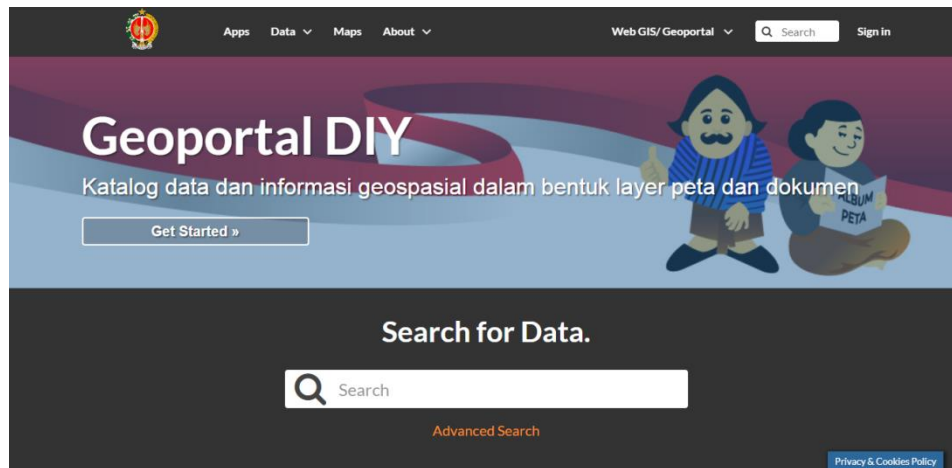
Dataku merupakan aplikasi yang terhubung ke website instansi Bappeda DIY, dan mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam menyediakan data statistik untuk keperluan perencanaan pembangunan. Dataku dapat diakses melalui alamat <http://www.bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>. Tampilan Dataku dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 9. Dataku**

#### 2.2.3.4 Geoportal

Geoportal merupakan aplikasi yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam penyediaan data berupa peta geospasial untuk keperluan perencanaan pembangunan. Penyediaan dan pengolahan data berupa peta masih cukup jarang dilakukan dalam proses perencanaan pembangunan, padahal hal ini menjadi sama pentingnya dengan data statistik yang berupa angka, karena paradigma perencanaan pembangunan yang bersifat kewilayahan membutuhkan data berupa peta geospasial. Salah satu contoh data yang disediakan dalam aplikasi Geoportal adalah Persebaran Desa Wisata Kabupaten Bantul. Peta tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat perencanaan untuk menentukan lokasi pembangunan desa wisata. Geoportal dapat diakses melalui <http://geoportal.jogjaprovo.go.id/>. Tampilan geoportal dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 10. Geoportal**

#### 2.2.3.5 Simnangkis (Sistem Penanggulangan Kemiskinan)

Simnangkis merupakan aplikasi yang mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam rangka penyediaan data penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Fitur utama dalam aplikasi meliputi database penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi capaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di DIY, inventarisasi program kegiatan kemitraan Pemda DIY dengan dunia usaha. Aplikasi Simnangkis dapat diakses melalui <http://simnangkis.jogjapro.go.id/>. Tampilan Simnangkis dapat dilihat pada gambar berikut

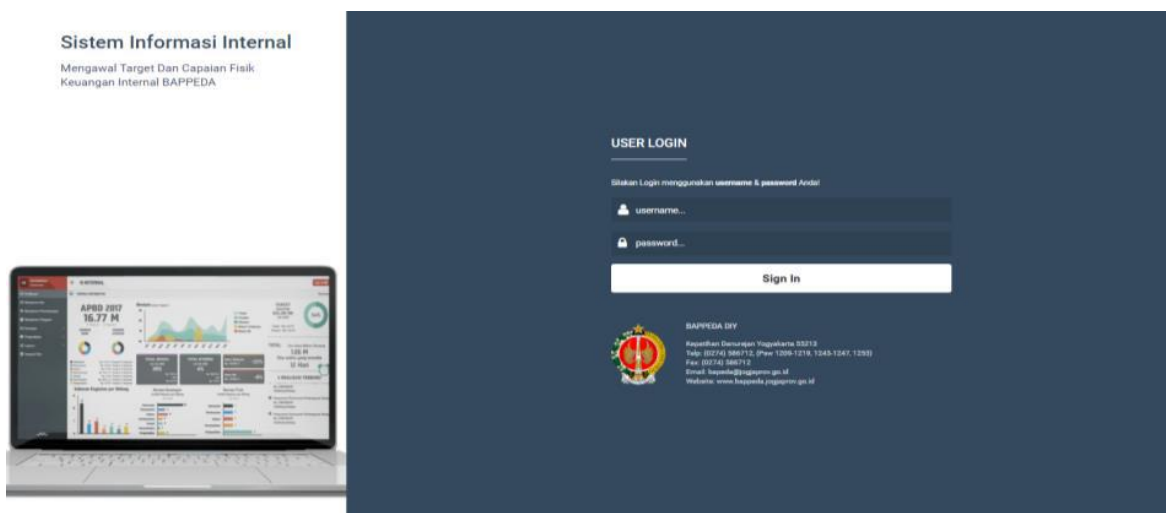
:



**Gambar 11. Simnangkis (Sistem Penanggulangan Kemiskinan)**

#### 2.2.3.4 Aplikasi Sistem Infomasi Internal

Sistem Informasi Internal Bappeda DIY dibangun pada tahun 2016 dengan fungsi utama untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan internal di Bappeda DIY. Sistem Informasi Internal telah mampu mendorong efektivitas pelaksanaan monev kegiatan di Bappeda. Tampilan aplikasi Sistem Informasi Internal Bappeda dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 12. Sistem Informasi Internal**

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda DIY sesuai Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan



daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- 1) Dokumen Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan RKPD Perubahan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan;
- 2) Dokumen Data dan Statistik guna menunjang perencanaan pembangunan (bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi DIY);
- 3) Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sarana prasarana serta dokumen perencanaan bidang pemerintahan.

Pada perubahan tugas fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020, fungsi penyusunan dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tidak lagi berada di Bappeda.

Dokumen-dokumen tersebut disusun setiap tahun dan kemudian disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) pembangunan di DIY. Selain itu juga disusun dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY tahun 2005 – 2025 yang berlaku selama 20 tahun serta, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY yang disusun selama 5 tahun sekali bersamaan dengan masa jabatan Kepala Daerah. Semua dokumen perencanaan pembangunan tersebut menjadi pedoman oleh seluruh Kabupaten/Kota dan OPD/Biro ataupun *stakeholders* lainnya dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya maupun dalam melaksanakan pembangunan.

Fungsi lain dari Bappeda DIY adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda DIY menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda DIY merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian kinerja pada tahun pertama Renstra dibandingkan dengan target per tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2-3 di bawah ini :

**Tabel 2-3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda DIY**

Uraian	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%		
2017-2022	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	16.292.281.000	15.123.330.970	8.244.498.170	15.897.190.000	20.281.049.000	13.905.249.969	13.603.101.196	16.838.414.056			109,4%	114,2%	79,39%			18,4%	-
											Predikat kinerja	Sangat baik	Sangat baik	Tinggi				

Dari Tabel 2-3 di atas, dapat diketahui bahwa target sasaran Bappeda DIY pada tahun 2018 telah tercapai, dengan persentase capaian sebesar 109,4%. Sasaran Bappeda DIY adalah “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas” dengan indikator kinerja “Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah”. Target pada tahun 2018 adalah sebesar 83,5%, sedangkan realisasi sebesar 91,35%, sehingga persentase capaian atau realisasi target pada tahun 2018 adalah sebesar 109,4%. Realisasi anggaran pada tahun pertama renstra yaitu tahun 2018 adalah sebesar Rp.13.905.249.969,-, atau sebesar 85,35% dari target anggaran renstra pada tahun 2018 sebesar Rp.16.292.281.000,-. Kinerja Bappeda pada tahun pertama renstra secara umum telah tercapai, dengan kategori predikat kinerja sangat baik.

Pada tahun 2019, target anggaran Bappeda DIY sebesar Rp.15.123.330.970,00, dengan realisasi sebesar Rp.13.603.101.196,00. Realisasi capaian sasaran perangkat daerah sebesar 114,2%, atau masuk dalam kategori sangat baik.

Pada tahun 2020, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada target dan realisasi anggaran perangkat daerah yang disebabkan refocusing anggaran karena pandemi covid-19. Target anggaran pada tahun ke tiga Renstra atau tahun 2020 sebesar Rp.8.244.498.170,00, dan realisasi sebesar Rp.6.838.414.056,00. Realisasi capaian sasaran perangkat daerah sebesar 79,39%, atau masuk dalam kategori tinggi.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada tahun ke tiga Renstra, capaian sasaran perangkat daerah Bappeda tidak mencapai target yang ditetapkan. Beberapa tantangan yang masih dihadapi Bappeda DIY dalam pencapaian sasaran dan pelayanan perangkat daerah antara lain adalah :

- 1) Terjadinya pandemi covid-19 yang terutama berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020, sehingga perencanaan yang telah disusun sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik;
- 2) Adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di daerah;
- 3) Belum optimalnya penyajian data statistik daerah yang terdiri dari data geospasial dan non geospasial sebagai input perencanaan pembangunan;
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappeda DIY dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah antara lain adalah :

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi yang sangat baik melalui penggunaan aplikasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyajian data yang telah diterapkan di DIY;
- 2) Beberapa penghargaan pada tingkat nasional yang telah diperoleh pada tahun 2020 dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Penghargaan tersebut meliputi Bhumandala Award dari Badan Informasi Geospasial untuk Simpul Jaringan Terbaik, Indriya Mandrawa Award dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk Pengguna Data Penginderaan Jauh Terbaik Tahun 2020, dan *Outstanding Achievement of Public Service Innovation* 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk inovasi Jogjaplan : Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang Ordinate (Konsisten, Responsif, Dinamis, dan Akuntabel) dengan e-planning;
- 3) Selain penghargaan ini, dari sisi kompetensi pegawai ada juga penghargaan Inovator Pemerintah Provinsi DIY (15 kelompok khusus pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diberikan kepada empat ASN Bappeda DIY.

## BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA DIY

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum pembangunan DIY diarahkan untuk mengatasi permasalahan pokok, yaitu masih tingginya ketimpangan antar wilayah, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan disparitas IPM antar wilayah. Berdasarkan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bappeda DIY mengampu penunjang urusan yang memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan pokok tersebut sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda DIY, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari tiga urusan, yaitu perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan. Dalam urusan perencanaan, terdapat dua permasalahan pokok, yaitu terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi proses perencanaan daerah dan kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan rencana. Dalam urusan statistik, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik, masih terdapat perbedaan data yang dihasilkan, dan perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data dalam perencanaan. Untuk urusan penelitian dan pengembangan, permasalahan utama adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk kebijakan perencanaan pembangunan. Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 3-1 berikut.

**Tabel 3-1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
	<b>Urusan perencanaan</b>		
1	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan waktu dan proses perencanaan di Pusat</li> <li>- Adanya kepentingan dan keterbatasan waktu perencanaan di Daerah</li> </ul>
2	Kesenjangan capaian sasaran pembangunan dengan Rencana	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan kepentingan dan kurangnya keterbukaan antara pemegang otoritas penganggaran dengan institusi perencanaan</li> </ul>
		Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendala teknis pelaksanaan di lapangan</li> <li>- Kurangnya komitmen SDM pelaksana</li> </ul>

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Urusan Statistik</b>			
3	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data	- Belum tersedia jabatan fungsional statistik
4	Perbedaan data statistik	Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama	- Perbedaan metodologi pengumpulan dan pengolahan data - Perbedaan kepentingan penggunaan data
5	Perbedaan waktu antara penyediaan dan kebutuhan data perencanaan	Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencanaan dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan	- Peraturan dan kebijakan yang berbeda pada instansi penyedia data dan instansi perencanaan
<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>			
1	Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan	Kegiatan penelitian belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan di DIY	- Terbatasnya jumlah penelitian yang dihasilkan oleh Pemda DIY

## 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

### 3.2.1 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY berupaya untuk menyinambungkan periode 5 tahun sebelumnya dengan periode yang selanjutnya, sebagaimana Visi Misi Gubernur DIY pada periode 2017-2022 berkesinambungan dengan periode sebelumnya. Pada periode 2012-2017, Visi Gubernur DIY memiliki tema “Jogja Renaisans” dengan visi “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. Konsep “Renaisans Yogyakarta” diwujudkan dengan semangat kolektif *Jogja Gumregah* untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul. Dalam lima tahun ke depan, spirit dari konsep “*Renaisans Yogyakarta*” secara konsisten tetap akan dipelihara, namun substansi dan penekanannya akan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan prediksi atas kondisi-kondisi yang sekiranya akan terjadi dalam kurun lima tahun ke depan.

Konsep *Renaisans Yogyakarta* dan *Semangat Jogja Gumregah* tersebut dikemukakan kembali Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam paparan visi dan misi pada tanggal 2 Agustus 2017. Pemaparan visi misi mengambil tema “***Menyongsong Abad Samudera***”



***Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja***” merupakan bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur DIY tersebut dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, *Kra-Canal/ Thai Canal Project* serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan.

Dari aspek kesejarahan, nenek moyang bangsa Jawa telah melakukan ekspansi dagang ke wilayah Timur Indonesia setelah pusat perdagangan Asia Tenggara bergeser dari Tuban ke Malaka untuk mengimbangi pedagang Cina yang hendak mencari komoditas rempah-rempah dan memperdagangkan barang-barang dari Jawa ke wilayah tersebut. Pilihan tema kemaritiman sebagai payung kebijakan Pembangunan Lima Tahun ke depan, merupakan upaya menyambung sejarah yang telah lama diukir oleh nenek moyang.

Dalam rangka meningkatkan potensi dan kerjasama antara negara-negara Samudra Hindia tersebut telah terbentuk IORA (Indian Ocean Rim Association atau Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia, 1997). Asosiasi ini telah membuat kesepakatan-kesepakatan kerjasama di bidang perikanan, energi kelautan, pelabuhan dan pelayaran, mineral dasar laut, bioteknologi kelautan, pariwisata, perdagangan, investasi, dan ekonomi.

Terkait dengan potensi strategis maritim tersebut, terdapat tantangan ke depan dengan dibangunnya Kra-Canal Project (Terusan Kra di Thailand). Laut Andaman dan perairan Teluk Thailand sehingga akan memperpendek jarak pelayaran dari belahan bumi bagian barat ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan China. Khusus untuk perairan Indonesia akan berdampak pada meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II (Alur Laut Kepulauan Indonesia-II yang mencakup Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Flores, dan Selat Lombok). Meningkatnya intensitas pelayaran di ALKI-II dapat berdampak pada meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran silang antara Asia-Australia dan Samudera Hindia-Samudera Pasifik. Fenomena Kra-Canal perlu diantisipasi ke depan sebagai peluang Pulau Jawa Bagian Selatan menjadi sangat penting terutama dalam hal penyediaan jasa pelabuhan, energi, perikanan, dan pariwisata, maupun tantangan apabila terjadi perubahan lalu lintas pelayaran

Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY ini memberikan latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong *"Abad Samudera Hindia"* juga untuk meningkatkan *"Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya"*. Dengan demikian, potensi Kawasan Selatan Yogyakarta perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia.

Berangkat dari uraian diatas Tema Visi *"Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"* dapat diartikan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta untuk meningkatkan kemuliaan martabat manusia khususnya dan Daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Sehingga dirumuskan visi Gubernur DIY untuk lima tahun ke depan yaitu:

## ***“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”***

Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam pencapaian “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia” yakni:

- 1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
- 2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
- 3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
- 4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
- 5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai dengan “Panca Mulia” tersebut di atas, manusia Jogja yang bermartabat mulia digambarkan sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas. Manusia Jogja yang bermartabat mulia merupakan substansi penting dari Visi Gubernur DIY 2017-2022 yang menggambarkan adanya tujuan peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja. Peningkatan harkat dan martabat manusia Jogja mencakup pengertian peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan beradab. Untuk itu strategi kebudayaan untuk meningkatkan harmoni kehidupan bersama masyarakat Yogyakarta serta mengatasi kesenjangan dan kemiskinan di wilayah Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja sangat perlu dikedepankan. Pembangunan ekonomi di wilayah Yogyakarta yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung.

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemantapan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai “Trilogi SDM-DIY”. Etos menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai “karya peradaban”, yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah “karya peradaban”. Etika, menyandang pesan “kemuliaan” dalam pengertian bersatunya “pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia”, dalam rangka menciptakan SDM yang “berintegritas” yang menjunjung tinggi budaya malu

dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di luar DIY (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi".

Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban;  
Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2, dan 3. Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar;
  - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan;
  - c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson);
  - d. Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga.
- 2) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;  
Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan,
  - a. Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD).
  - b. Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDM-DIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS. Etos, dalam konteks Trilogi

SDM-DIY menyandang pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantor, menjadi tugas birokrasi sebagai "karya peradaban", yang menyandang arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban", karena tanpa kontribusi karya pelayanan birokrasi, peradaban di DIY tentu tidak akan berkembang menjadi peradaban seperti yang dapat kita saksikan hari ini. Etika, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kualitas, dalam konteks Trilogi SDM-DIY menyandang pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsi hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di tempat lain (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi". Untuk itu, membangun birokrasi dengan "Ruh budaya karya berkualitas tinggi" akan menjadi penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Lima Tahun ke depan. Ketiga aspek "Trilogi SDM-DIY", merupakan satu kesatuan yang utuh. Negara Scandinavia dan Jepang, adalah contoh negara yang memiliki SDM dengan etos kerja tinggi, etika tinggi, dan budaya kualitas tinggi.

### 3.2.2 Tujuan, Sasaran Pemerintah Daerah

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berpijak dari visi dan misi pembangunan daerah, berikut disajikan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2017-2022:

**Tabel 3-2. Tujuan Dan Sasaran Pemda DIY 2017-2022**

Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia"					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	<b>Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban</b>	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022)	1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
				1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini
					Persentase Angka Kemiskinan
				1.3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi
				1.4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi.
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
				1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.	Indeks Williamson
2.	<b>Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;</b>	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (bb) (2016) menjadi 76 (a) (2022)	2.1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK
					Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
				2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Prosentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
				2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

### 3.2.3 Tugas Dan Fungsi Bappeda DIY Yang Terkait Secara Langsung Dengan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 24 (ayat 1, ayat 5, dan ayat 6) Bappeda DIY dikategorikan sebagai Badan Daerah Provinsi, dan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

provinsi diantaranya melaksanakan urusan perencanaan sesuai ketentuan undang-undang dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah Provinsi. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Bappeda mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur DIY nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tugas Bappeda ialah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik. Hal tersebut terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke-2 Gubernur dalam *"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"*. Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 Tahun 2018 yang terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2020, dapat digambarkan dukungan tugas dan fungsi Bappeda sebagai berikut:

**Tabel 3-3. Keterkaitan Visi, Misi Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah dan Rincian Tugas dan Fungsi Bappeda**

<b>Visi: "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia"</b>				
<b>Misi ke-2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis</b>				
<b>Tujuan/ Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program Pemerintah Daerah</b>	<b>Urusan/ Tugas/ Fungsi Bappeda</b>
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).  Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi dengan target nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022)."	2.1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK  Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Urusan: 1. Penunjang Pemerintah : Perencanaan 2. Wajib Non Pelayanan Dasar : Statistik 3. Penunjang Pemerintah : Penelitian dan Pengembangan  Tugas: melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik  Fungsi 1. Penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik 3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah,

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”				
Misi ke-2: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis				
Tujuan/ Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemerintah Daerah	Urusan/ Tugas/ Fungsi Bappeda
				<p>penelitian dan pengembangan, serta statistik</p> <p>5. Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di DIY</p> <p>6. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian</p> <p>7. Penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan</p> <p>8. Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah</p> <p>9. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan</p> <p>10. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan</p> <p>11. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota</p> <p>12. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas badan</p> <p>13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi badan</p>

Berdasarkan Tabel 3-3 dapat dijelaskan bahwa terkait dengan visi misi Gubernur DIY 2017-2022, tugas dan fungsi Bappeda DIY mendukung pelaksanaan misi ke-2 Gubernur dalam “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis” yang memiliki tujuan berupa “Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*).” Tujuan tersebut diukur dengan pencapaian “Indeks Reformasi Birokrasi dengan target nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022).” Adapun tujuan Pemerintah Daerah tersebut memiliki 3 sasaran yakni,

- 1) Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan;
- 2) Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan;
- 3) Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan” diimplementasikan dengan pelaksanaan program Pemerintah Daerah “Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah” yang didukung beberapa perangkat daerah yang memiliki urusan penunjang yang mendukung dengan program pemerintah daerah tersebut. Salah satu urusan penunjang yang mendukung pencapaian sasaran dan program tersebut ialah urusan perencanaan yang dilaksanakan Bappeda DIY. Dukungan Bappeda DIY dengan



menyelaraskan sasaran perangkat daerah dan tugas-fungsi perangkat daerah dalam menunjang capaian sasaran pemerintah daerah dan program pemerintah daerah terkait.

### 3.2.4 Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Bappeda Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda untuk mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan Bappeda DIY terdapat adanya faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut:

**Tabel 3-4.Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda**

No	Faktor-Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Pendorong
<b>Urusan perencanaan</b>		
1.	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan Dekonsentrasi dari Kementerian PPN/ Bappenas</li> <li>b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah.</li> <li>c. Dukungan SDM Bappeda dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi</li> <li>d. Dukungan Sistem Informasi Perencanaan dan Sistem Informasi Pengendalian</li> </ul>
2.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilaksanakannya Arahan Gubernur kepada TAPD mengawali penyusunan perencanaan strategis lima tahunan maupun tahunan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran beserta forum-forum TAPD yang dilaksanakan mengikuti arahan tersebut.</li> <li>b. Pelibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.</li> <li>c. Dukungan SDM Bappeda dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi</li> <li>d. Dukungan Sistem Informasi Perencanaan Jogjaplan dan Sistem Informasi Pengendalian Sengguh/ Jogjakendali</li> </ul>
3.	Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka menjamin dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah.</li> <li>b. Pemantauan perencanaan pembangunan yang didukung Sistem Informasi Perencanaan Jogjaplan dan Sistem Informasi Pengendalian Sengguh/ Jogjakendali.</li> <li>c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian setiap triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan</li> <li>d. Kerjasama Pemda DIY dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping perangkat daerah</li> </ul>
<b>Urusan Statistik</b>		

No	Faktor-Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Pendorong
3	Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data	a. Pelaksanaan kerjasama Bappeda dan Institusi resmi pemerintah yang membidangi statistik, BPS b. Kerjasama Pemda DIY dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan dan analisis pembangunan. c. Dukungan sistem informasi data Jogja Dataku yang terus diupdate berkala.
4	Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama	a. Terbentuknya Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah mendukung sinkronisasi data statistik statistik/ sektoral b. Terbentuknya tim Forum Simpul Jaringan dalam rangka mengelola peta dan data spasial c. Dukungan sistem informasi data Jogja Dataku yang terus diupdate berkala.
5	Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencanaan dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan	a. Terbentuknya Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah mendukung sinkronisasi data statistik statistik/ sektoral b. Terbentuknya tim Forum Simpul Jaringan dalam rangka mengelola peta dan data spasial c. Dukungan sistem informasi data Jogja Dataku yang terus diupdate berkala.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Kab/Kota

Keselaran perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Bappenas dan Kabupaten/Kota. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas maupun Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di DIY terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda DIY.

Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra 2014-2019 menetapkan 2 (dua) sasaran yang sebagai berikut

- 1) Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari 1) Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
- 2) Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Dari dua sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda DIY adalah sasaran 1. Kata kunci dalam sasaran tersebut adalah perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan di daerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

**Tabel 3-5. Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Belum Optimalnya Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah	Perbedaan periodewaktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan aktor di kementerian kunci memudahkan koordinasi
2	Tewujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih			

Secara umum berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di DIY, kata kunci sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan, keselarasan perencanaan antar lembaga dan keselarasan perencanaan antar waktu (tahunan dan menengah). Kualitas perencanaan ditunjukkan dengan pencapaian program/kegiatan yang sesuai antara target dan realisasi. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda DIY berdasarkan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

**Tabel 3-6. Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY Berdasarkan Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten/Kota di DIY Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
A. Bappeda Kota Yogyakarta				
1	Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahaan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan)</li><li>• Belum optimalnya kapasitas perencanaan pada instansi sektoral</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya komitmen dalam forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota</li><li>• Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi</li></ul>
B Bappeda Kabupaten Kulon Progo				
1	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahaan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasis kawasan (desa, kecamatan)</li><li>• Belum optimalnya kapasitas perencanaan pada instansi sektoral</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya komitmen dalam forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota</li><li>• Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi</li></ul>

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Bappeda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
2	Meningkatnya pencapaian program kegiatan pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya sinergi pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bidang-bidang perencanaan, pengendalian dan OPD pelaksana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya mekanisme desk timbal balik monitoring dan evaluasi</li> <li>Proses pengendalian yang didukung dengan teknologi informasi</li> </ul>
<b>C Bappeda Kabupaten Gunungkidul</b>				
1	Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahaan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasiskan kawasan (desa, kecamatan)</li> <li>Belum optimalnya kapasitas perencanaan pada instansi sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen dalam forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota</li> <li>Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi</li> </ul>
2	Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada keterbatasan kapasitas perencanaan pada OPD Mitra</li> <li>Perbedaan atau perubahan periode perencanaan baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi</li> <li>Kualitas SDM yang memadai</li> </ul>
<b>D Bappeda Kabupaten Sleman</b>				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahaan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasiskan kawasan (desa, kecamatan)</li> <li>Belum optimalnya kapasitas perencanaan pada instansi sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen dalam forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota</li> <li>Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas layanan publik			
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Data yang dibutuhkan dalam perencanaan belum tersedia tepat waktu sesuai tata kala perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya kinerja sumber daya pengumpul data</li> <li>Masih adanya perbedaan definisi data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah adanya kerjasama dengan BPS</li> <li>Adanya sistem informasi pendukung pengembangan data</li> </ul>
4	Meningkatkan kualitas perencanaan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahaan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya data mikro penunjang perencanaan yang berbasiskan kawasan (desa, kecamatan)</li> <li>Belum optimalnya kapasitas perencanaan pada instansi sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen dalam forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota</li> <li>Proses perencanaan pembangunan yang didukung dengan teknologi informasi</li> </ul>
5	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi			
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan irigasi			

No	Sasaran Menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan Bappeda DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
7	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup			
8	Meningkatnya kualitas perencanaan penataan ruang daerah dan sarpras			

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRW merupakan matra spasial pembangunan daerah dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, dan udara. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY Tahun 2009-2029 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dalam jangka waktu 20 tahun.

Adapun perwujudan indikasi program utama lima tahunan terdiri dari nama program, lokasi, besaran, periode pelaksanaan Tahap I, sumber biaya, instansi pelaksana dan periode pelaksanaan ( 5 tahunan). RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, rencana pola ruang wilayah DIY terdiri atas pengelolaan kawasan lindung dan pengelolaan kawasan budidaya. Kawasan Lindung meliputi :

- 1) Kawasan Lindung bawahan;
- 2) Kawasan Lindung setempat;
- 3) Kawasan Suaka Alam;
- 4) Kawasan Suaka Margasatwa;
- 5) Kawasan Rawan Bencana Alam;

Kawasan budidaya memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Secara umum, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang di kawasan budidaya terdiri dari:

- 1) Kawasan peruntukan hutan produksi;
- 2) Kawasan peruntukan pertanian;
- 3) Kawasan peruntukan perikanan;
- 4) Kawasan peruntukan pertambangan;
- 5) Kawasan peruntukan industri;
- 6) Kawasan peruntukan pariwisata;
- 7) Kawasan peruntukan permukiman;

- 8) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan
- 9) Kawasan peruntukan lainnya.

Pemda DIY telah melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2009–2029. Fokus Program Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009–2029 yaitu pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Adapun beberapa hal yang menjadi dasar peninjauan kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009–2029 yaitu:

- 1) Adanya perubahan/penyempurnaan peraturan atau rujukan sistem penataan ruang yang berlaku mengikat bagi Pemerintah Daerah DIY dan belum pernah digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang sebelumnya. Salah satunya yaitu amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana salah satu keistimewaan DIY yang ditetapkan adalah urusan Tata Ruang sebagai dasar dalam pengaturan pengelolaan pemanfaatan ruang pada kawasan Kasultanan dan Kadipaten.
- 2) Terjadi perubahan kebijakan pemerintah/sektor untuk pembangunan skala besar atau kegiatan penting sehingga tidak dapat ditampung oleh pola dan struktur ruang RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 - 2029 yang ada. Perubahan tersebut akan mengganggu rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang sehingga mungkin dapat menurunkan efisiensi pembangunan dan atau kerusakan lingkungan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain penentuan kawasan cagar alam geologi oleh Kementerian ESDM, pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), dan rencana pembangunan bandara baru.
- 3) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan seringkali radikal dalam hal memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan meminimalkan kerusakan lingkungan, sehingga kapasitas daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan oleh karena hal ini harus selalu diantisipasi untuk keperluan optimasi pola dan struktur tata ruang yang ada.
- 4) Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada untuk kepentingan pembangunan pasca bencana tersebut. Salah satu bencana alam yang berpengaruh terhadap struktur dan pola ruang yaitu erupsi gunung merapi pada tahun 2010 yang berakibat pada penetapan kawasan rawan bencana.

Fokus Program Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009 – 2029 pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Program Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya).

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendorong/koordinasi sampai tingkat kabupaten/kota untuk melegalkan perangkat pengendalian seperti Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Keselarsan tugas dan fungsi Bappeda DIY dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk didalamnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Bappeda DIY dalam menjaga keselarsan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Bappeda DIY selaku Sekretariat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DIY melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis pendukung dan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait dengan penyusunan program dan penyusunan dokumen perencanaan pemanfaatan ruang serta pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang untuk sinkronisasi pembangunan dengan rencana tata ruang yang berlaku.

### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

KLHS merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarsan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah.

Identifikasi isu strategis pada KLHS RPJMD DIY didasari oleh penilaian terhadap kondisi sebagai berikut:

- 1) Berpotensi menimbulkan lingkungan hidup dan sosial ekonomi yang relevan dengan DIY, terutama kemacetan, persampahan, konversi lahan, gentrifikasi, PKL, dan nilai hidup dan budaya;
- 2) Mempunyai relevansi untuk dapat segera diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun untuk meminimalisir dampak kumulatif yang lebih luas;
- 3) Menyangkut hajat hidup orang banyak atau khalayak (pemangku kepentingan).

Hasil dari proses penapisan isu panjang menghasilkan lima isu strategis yang terdiri dari isu lingkungan (2 isu), isu ekonomi (2 isu) dan Isu sosial (1 isu) yang penjabarannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana;
- 2) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian;



- 3) Ketimpangan wilayah masih tinggi;
- 4) Penyediaan infrastruktur strategis di kawasan pesisir selatan belum optimal;
- 5) Angka kemiskinan masih tinggi.

Program pembangunan daerah yang telah dikaji dalam KLHS memiliki dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup. Kedua program pemda tersebut yaitu program pengembangan sektor dominan dan program pengembangan pusat pertumbuhan. Kedua program tersebut dapat memiliki pengaruh yang negatif dua isu strategis pembangunan berkelanjutan terutama isu pencemaran, kerusakan lingkungan dan risiko bencana dan isu pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal dan masih tingginya alih fungsi lahan pertanian.

Selanjutnya implikasi terhadap pelayanan Bappeda DIY yaitu Bappeda DIY melakukan koordinasi kepada pemangku kebijakan serta para stakeholder sebagai Langkah antisipasi agar ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat lestari, pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui PLP2B serta pemantauan/monev sumber pencemar lingkungan.

**Tabel 3-7. Faktor Penghambat dan Pendorong Terkait Pelayanan Bappeda DIY ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS**

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas fungsi Bappeda DIY pada peran koordinasi	Dokumen RTRW belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Bappeda DIY selaku Sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Permendagri nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	Implikasi KLHS	Dokumen perencanaan Pembangunan belum semuanya diikuti dengan kajian KLHS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuantitas dan kapasitas SDM yang memahami KLHS terbatas</li> <li>- Adanya regulasi tentang KLHS yang saling tumpang tindih antara Kemendagri dan KLHK dan belum adanya turunan dari PP 46 tahun 2016</li> </ul>	Adanya regulasi tentang KLHS ( Undang-Undang , Peraturan Pemerintah, Peraturan Menti ) yang menegaskan kewajiban untuk penyusunan dokumen KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappeda DIY senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena

itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappeda DIY di masa datang.

Perumusan isu-isu strategis Bappeda DIY untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas fungsi Bappeda DIY; (2) gambaran pelayanan Bappeda DIY; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra Bappenas; (4) hasil telaah terhadap Renstra Bappeda kabupaten/kota; (5) hasil telaah RTRW; dan (6) hasil telaah KLHS.

Review singkat dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam perumusan isu-isu strategis yang telah disajikan dalam subab-subab sebelumnya sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pembangunan terkait penyelenggaraan urusan sesuai tusi  
Permasalahan pembangunan dengan penyelenggaraan urusan perencanaan di Bappeda DIY yaitu: (a) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah; (b) Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan (c) Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan. Sedangkan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan statistik yaitu: (a) Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data; (b) Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama; dan (c) Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencanaan dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan.
- 2) Gambaran pelayanan Bappeda DIY  
Target kinerja di dalam renstra Bappeda DIY periode sebelumnya telah tercapai kecuali pada indikator persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan. Kinerja pelayanan Bappeda DIY telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai termasuk dengan adanya sistem informasi yang menghasilkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang semakin berkualitas maupun untuk manajerial internal Bappeda DIY. Dari sisi kualitas, Bappeda DIY sudah didukung dengan SDM yang berkompeten, akan tetapi dari sisi kuantitas masih kekurangan.
- 3) Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN/Bappenas  
Sasaran strategis dalam Renstra Bappenas yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan Bappeda DIY adalah perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Keberhasilan pencapaiannya dipengaruhi oleh perencanaan di daerah karena harus ada keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.
- 4) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappeda Kabupaten/Kota  
Secara umum Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di DIY memiliki sasaran jangka menengah meningkatkan kualitas perencanaan, keselerasan perencanaan antar lembaga dan keselerasan perencanaan antar waktu (tahunan dan menengah).

5) Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappeda DIY

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

6) Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda DIY

Implikasi dari KLHS adalah Bappeda dalam penyusunan perencanaan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, maka harus dilakukan KLHS.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi di bidang perencanaan dan statistik, serta dengan memperhatikan terhadap aspek lain dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya kemudian dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda DIY untuk lima tahun ke depan (periode 2017-2022) yaitu:

- 1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
- 2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
- 3) peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
- 4) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
- 5) Peningkatan peran Bappeda DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
- 6) Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional.

Isu-isu strategis di atas telah mempertimbangkan aspek-aspek dalam perumusan isu strategis.

**Tabel 3-8. Rumusan Isu-Isu Strategis**

Hasil Telaah Sub bab 2.3, 2.4, 3.1 sampai dengan 3.3		
<b>Kinerja Pelayanan</b>	<b>Sub bab 2.2</b>	Mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015, Bappeda DIY masih kekurangan pegawai
		Sistem informasi sangat membantu Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi
	<b>Sub bab 2.3</b>	capaian kinerja Bappeda DIY tahun 2013 -2017 dalam kurun waktu RPJMD 2012-2017, sebagian besar target kinerjatelah tercapai, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Satu indikator yang tidak mencapai target yaitu " persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan".
<b>Tantangan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Sub bab 2.4</b>	1) Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
		2) Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan;
		3) Hasil musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karena tingkat keterwakilan masyarakat masih rendah serta masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing OPD
		4) Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, sehingga usulan kegiatan dari daerah kepada Pemerintah tidak mendapatkan respon jelas yang menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah
		5) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala ditingkat OPD untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai <i>feedback</i> bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
<b>Peluang Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Sub bab 2.4</b>	1) Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Dengan adanya tambahan kewenangan DIY dalam hal urusan keistimewaan tersebut maka Bappeda DIY dapat merencanakan secara lebih leluasa pada perumusan kebijakan pada lima urusan kewenangan keistimewaan yaitu : Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan, Tata Ruang dan Kebudayaan

Perumusan Isu-isu Strategis
1)Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2)Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3)peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
4)Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari <i>e-planning</i> , <i>e-budgeting</i> , <i>e-monev</i> , dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
5)Peningkatan peran BAPPEDA DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
6) Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015

Hasil Telaah Sub bab 2.3, 2.4, 3.1 sampai dengan 3.3		
		2) Terbitnya Permendagri 86 Tahun 2017 memungkinkan peningkatan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pengendalian Kabupaten Kota dengan Provinsi
		3) Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan
		4) Komitmen OPD lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari OPD lain
		5) Terdapatnya kebijakan penilaian kinerja instansi yang memasukkan unsur perencanaan dan pengendalian
		6) Kemudahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui pengembangan aplikasi JOGJAPLAN maupun aplikasi perencanaan dari pemerintah pusat (SIMLARAS dan KRISNA)
		7) Kemudahan pemanfaatan hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan, melalui pengembangan aplikasi web money (SENGGUH) dan JOGJA DATAKU
<b>Permasalahan</b>	<b>Sub bab 3.1</b>	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah
		Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
		Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan
		Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data
		Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama
		Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencanaan dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan
<b>Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah</b>	<b>Sub bab 3.2</b>	Faktor Penghambat Pelayanan Bappeda:
		Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah
		Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
		Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan
		Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data

<b>Perumusan Isu-isu Strategis</b>
------------------------------------

Hasil Telaah Sub bab 2.3, 2.4, 3.1 sampai dengan 3.3		
		Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama
		Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan
		Faktor Pendorong Pelayanan Bappeda:
		Dukungan Dekonsentrasi dari Kementerian PPN/ Bappenas
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah.
		Dukungan SDM Bappeda dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi
		Dukungan Sistem Informasi Perencanaan dan Sistem Informasi Pengendalian
		Dilaksanakannya Arahan Gubernur kepada TAPD mengawali penyusunan perencanaan strategis lima tahunan maupun tahunan untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan perencanaan dan penganggaran beserta forum-forum TAPD yang dilaksanakan mengikuti arahan tersebut
		Pelibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
		Dukungan SDM Bappeda dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi
		Dukungan Sistem Informasi Perencanaan Jogjaplan dan Sistem Informasi Pengendalian Sengguh/ Jogjakendali
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi (Forum Trilateral Desk) setiap tahun dalam rangka menjamin dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional-daerah.
		Pemantauan perencanaan pembangunan yang didukung Sistem Informasi Perencanaan Jogjaplan dan Sistem Informasi Pengendalian Sengguh/ Jogjakendali.
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian setiap triwulan untuk mengendalikan dan memantau konsistensi Perangkat Daerah terhadap perencanaan pembangunan
		Kerjasama Pemda DIY dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan sebagai pendamping perangkat daerah

<b>Perumusan Isu-isu Strategis</b>
------------------------------------

Hasil Telaah Sub bab 2.3, 2.4, 3.1 sampai dengan 3.3		
		Pelaksanaan kerjasama Bappeda dan Institusi resmi pemerintah yang membidangi statistik, BPS
		Kerjasama Pemda DIY dengan Universitas/ Institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada untuk bersinergi dalam mengawal perencanaan dan analisis pembangunan.
		Dukungan sistem informasi data Jogja Dataku yang terus diupdate berkala.
		Terbentuknya Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah mendukung sinkronisasi data statistik statistik/ sektoral
		Terbentuknya tim Forum Simpul Jaringan dalam rangka mengelola peta dan data spasial
<b>Telaah Renstra K/L</b>	<b>Sub bab 3.3</b>	Dari dua sasaran strategis Bappenas, yang memiliki hubungan langsung dengan pelayanan Bappeda DIY adalah sasaran 1 yaitu perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan di daerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah
<b>Telaah Renstra BAPPEDA Kab/kota</b>	<b>Sub bab 3.3</b>	Secara umum berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di DIY, kata kunci sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah kualitas perencanaan, keselarasan perencanaan antar lembaga dan keselarasan perencanaan antar waktu (tahunan dan menengah)
		Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan kewilayahaan dan sektoral serta antara perencanaan program tingkat provinsi dan kabupaten/kota
<b>Telaah RTRW</b>	<b>Sub bab 3.4</b>	Tidak ada permasalahan karena tugas fungsi Bappeda DIY pada peran koordinasi
<b>Telaah KLHS</b>	<b>Sub bab 3.4</b>	Dokumen perencanaan Pembangunan belum semuanya diikuti dengan kajian KLHS

#### Perumusan Isu-isu Strategis





## BAB 4

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda DIY

Tujuan Bappeda DIY dirumuskan berdasarkan analisa permasalahan dan isu-isu strategis yang sudah diuraikan pada BAB 3 antara lain :

- 1) Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
- 2) Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
- 3) peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas yang tinggi.
- 4) Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
- 5) Peningkatan peran Bappeda DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
- 6) Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015.

Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan di atas dan tugas serta fungsi yang diemban Bappeda DIY untuk periode 2017-2022 menetapkan tujuan Bappeda DIY adalah ***“Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi”***. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah ***“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”***.

Tujuan Bappeda DIY *Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi* mempunyai makna bahwa Bappeda DIY harus mampu menjadi penggerak pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah DIY. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan melalui program kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

*Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi* harus dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang ditetapkan. Bappeda DIY harus mampu menjadi Perangkat Daerah yang menyusun perencanaan daerah yang baik sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, sehingga tujuan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan yang disusun harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan strategi, arah kebijakan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Rasionalitas dan basis data adalah ciri yang menjadi kunci kualitas perencanaan.

*Perencana yang Bernilai Tinggi* mengandung maksud bahwa perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi PD (Perangkat Daerah) dalam menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing serta kelembagaan Bappeda DIY menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*. Selain itu, perencanaan yang disusun

Bappeda DIY harus merupakan perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based* dan *knowledge based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan visioner (berorientasi ke depan).

Berkenaan dengan permasalahan dan pelaksanaan tugas-fungsi terkait serta menunjang program pemerintah daerah DIY dapat diuraikan sasaran perangkat daerah dan program perangkat daerah Bappeda DIY yang termuat dalam draft cascading RPJMD DIY 2017-2022 yaitu: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”. Kualitas dimaksud ditunjukkan melalui ketercapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah. Maka Bappeda DIY harus mampu menjadi institusi perencanaan yang dapat menjamin perencanaan pembangunan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

**Tabel 4-1. Tujuan, indikator tujuan/sasaran Bappeda DIY tahun 2017-2022**

Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan
Menjadi Institusi	Terwujudnya	Indikator sasaran
Perencana yang Bernilai	Perencanaan	Perangkat Daerah tahun
Tinggi	Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Nyang tercapai /Indikator sasaran RPJMD x 100%

Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah Bappeda DIY dari tahun 2017-2022 kami sampaikan dalam Tabel 4-2.sebagai berikut:

**Tabel 4-2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				Based line (2017)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indikator sasaran PD tahun N yang tercapai /Indikator sasaran RPJMD x 100%	83,0	83,5	84,0	84,5	85,0	85,5

## BAB 5

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai DIY harus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan adaptasi terhadap perkembangan jaman, kemajuan daerah lain, dan lingkungan eksternal lainnya. Disamping itu lingkungan internal juga menjadi pertimbangan yang penting karena didalamnya berisi sumber daya yang dimiliki sehingga tujuan dan sasaran yang dirumuskan harus berdasarkan kondisi riil.

#### 5.1 Strategi Dan Kebijakan

##### 5.1.1 Analisis Lingkungan Strategis

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien.

##### 5.1.1.1 Identifikasi Kekuatan, kelemahan, Peluang Dan Tantangan

**Tabel 5-1. Identifikasi Lingkungan Strategis**

FAKTOR INTERNAL			
No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
S1	Sarana / prasarana Kerja yang memadai	W1	Belum optimalnya sistem pengelolaan data base perencanaan
S2	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas	W2	Lemahnya koordinasi internal dan antar bidang, dan dengan SKPD
S3	Kualitas SDM yang memadai	W3	Belum adanya sistem baku untuk mengantisipasi perubahan kebijakan
S4	Motivasi bekerja yang kuat	W4	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
S5	Adanya forum data pembangunan daerah		
FAKTOR EKSTERNAL			
No.	PELUANG (O)	No.	ANCAMAN (T)
O1	Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM	T1	Kurangnya komitmen kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan
O2	Perkembangan teknologi/ sistem informasi	T2	Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi
O3	Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang semakin optimal	T3	Regulasi yang sering berubah yang berpotensi menghambat proses perencanaan dan pengendalian pembangunan
O4	Keberadaan forum <i>Pentahelix (Academic, Business, Community, Government, dan Media)</i> yang mendukung perencanaan pembangunan	T4	Masih belum optimalnya Komitmen instansi pelaksana

Sumber : Hasil Analisis TimBAPPEDADIY

#### 5.1.1.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Faktor Kunci Keberhasilan adalah faktor yang dinilai sangat berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Faktor Kunci Keberhasilan juga disebut sebagai kekuatan kunci.

Untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor maka digunakan metode komparasi. Metode komparasi yaitu suatu metode untuk menentukan urgensi atau tingkat kepentingan satu faktor dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, guna menentukan faktor mana yang lebih urgen.

### 5.1.2 Perumusan dan Penetapan Strategi

#### 5.1.2.1 Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni:

- a. **Strategi ekspansi** dirumuskan pada kuadran I  
Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.
- b. **Strategi diversifikasi** dirumuskan pada kuadran II  
Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.
- c. **Strategi stabilitas/ rasionalisasi** dirumuskan pada kuadran III  
Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. **Strategi defensif / survival** dapat dirumuskan pada kuadran IV.  
Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi SWOT berikut:

	Strength (S)	Weakness (W)
<b>IFAS</b>	Sarana / prasarana Kerja yang memadai.	Belum optimalnya system pengelolaan data base perencanaan
	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	Lemahnya koordinasi internal dan antar bidang, dan dengan SKPD.
<b>EFAS</b>	Kualitas SDM yang memadai.	Jumlah SDM belum sebanding dengan beban kerja.
	Motivasi bekerja yang kuat.	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
	Adanya forum data pembangunan daerah.	
Opportunities (O)	S-O	W-O
<b>Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM</b>	Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Untukmengoptimalkan Pengelolaan data Perencanaan
<b>Perkembangan teknologi/ sistem informasi</b>	Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan	Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan Monitoring Evaluasi
<b>Keberadaan forum Pentahelix yang mendukung perencanaan pembangunan</b>	Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membangun sinergi melalui forum Pentahelix	Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan evaluasi
Threats (T)	S-T	W-T
<b>Kurangnya komitmen kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan</b>	Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan	Meningkatkan Teknologi Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi
<b>Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi</b>	Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu perencanaan dan pengendalian Pembangunan	Integrasi sistem perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi
<b>Regulasi yang sering berubah yang berpotensi menghambat proses perencanaan dan pengendalian pembangunan</b>	Meningkatkan peran forum Pentahelix untuk membangun sinergi dengan kabuapten/kota	Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota

#### 5.1.2.2 Penerapan Strategi

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dari dua misi Gubernur DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022 secara langsung Bappeda mendukung pada Misi ke-2. Secara rinci strategi dan arah kebijakan Bappeda DIY dalam mendukung misi ke-2 Gubernur DIY dapat dilihat pada Tabel 5-2.

**Tabel 5-2. Tujuan , Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</b>			
<b>MISI 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	1. Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.	1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda.
		2. Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan.	2. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan.
		3. Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membangun sinergi melalui forum Pentahelix.	3. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan.
		4. Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan	4. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.
		5. Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu perencanaan dan pengendalian Pembangunan	5. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan,
		6. Meningkatkan peran forum Pentahelix untuk membangun sinergi dengan kabuapten/kota	6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.
			7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan.



<b>VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</b>			
<b>MISI 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7. Meningkatkan Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi	8. Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi di luar Bappeda DIY yang terkait.
		8. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	
		9. Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi	
		10. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk memperkecil dampak perubahan kebijakan	
		11. Integrasi sistem perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi	
		12. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota	
			9. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan
			10. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur
			11. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data
			12. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, Jogja Dataku, Geoportal, dan Simnangkis) sesuai dengan kebutuhan.
			13. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur.

## **BAB 6**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program/kegiatan Bappeda DIY disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

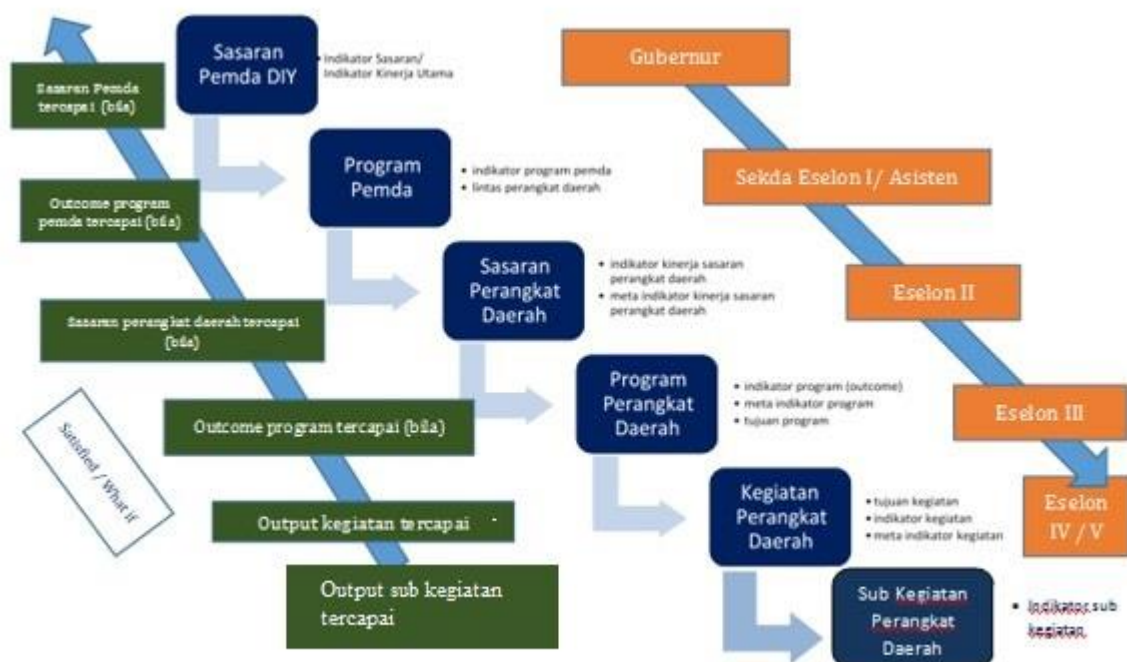
Karena ada perubahan Peraturan daerah yang mengatur kelembagaan Pemerintah Daerah DIY maka rencana program/kegiatan Bappeda DIY untuk lima (5) tahun direncanakan untuk dua periode, periode 2017-2018 menyesuaikan struktur organisasi Bappeda DIY berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan untuk periode 2019-2022 menyesuaikan struktur organisasi berdasar pada Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

Rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Bappeda DIY yang berfungsi sebagai institusi perencanaan, statistik, serta pengendalian terdiri 12 program yaitu: Program Pengembangan Statistik Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana, Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Program Pengendalian Pembangunan Daerah, Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan (pada tahun 2018), Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatu, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Dengan adanya Perda No 1 Tahun 2018 pada tahun 2019 ada penambahan Program Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari dua kegiatan yaitu Penelitian Pembangunan Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah.

Berkaitan dengan penajaman kegiatan dan perubahan kegiatan sesuai dengan substansi Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/KSP/IX/2018 Nomor 67/DPRD/2018 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 terdapat perubahan kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang diikuti dengan usulan perubahan nomenklatur struktur eselon IV sebagai penanggungjawab kegiatan pada salah satu bidang di Bappeda DIY yaitu Bidang Perencanaan, serta perubahan kegiatan pada bidang-bidang

lain di Bappeda DIY yang tidak diikuti perubahan nomenklatur struktur eselon IV sebagai penanggungjawab kegiatan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan RPJMD, perlu disusun visi, misi Gubernur yang penyelenggaraannya memerlukan dana keistimewaan pada program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Perubahan tersebut menyesuaikan proses penyusunan meta program yang mendeskripsikan bagaimana proses bisnis program perangkat daerah (dalam hal ini Bappeda DIY) secara hierarki terkait dan memberikan dukungan pada capaian Sasaran Gubernur, capaian program Pemerintah Daerah (Program Pemda), capaian sasaran perangkat daerah, serta bagaimana proses bisnis kegiatan beserta indikator keluaran (*output*) mendukung capaian hasil (*outcome*) program sesuai dengan kerangka logis *cascading* RPJMD DIY 2017-2022.

Hierarki yang dideskripsikan dalam meta program dapat digambarkan melalui potongan kerangka logis *cascading* RPJMD DIY Tahun 2017-2022 sebagai berikut yang telah disesuaikan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 :



**Gambar 13. Kerangka Logis Meta Program berdasar RPJMD DIY 2017-2022 dan  
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019**

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersaji pada Tabel 6-1 berikut

**Tabel 6-1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Menjadi institusi perencanaan pembangunan yang bernilai tinggi	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	1	Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	2.022.659.850	100%	2.225.401.510	100%	2.530.985.680	100%	2.592.968.000	100%	2.749.552.000	100%	12.628.914.680	BAPPEDA DIY	DIY
			33	Penyediaan Jasa Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : - Surat keluar - Surat Masuk - Pengiriman Dokumen - Benda Pos 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Pembayaran tagihan rekening Telepon12 Bulan - Pembayaran Tagihan rekening listrik: 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : - Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY dan BSD 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor : - Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : - Barang Cetakan - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor 8. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 9. Bahan bacaan dan Perundang-undangan : - surat kabar - Buku Ilmu Pengetahuan Umum - Buku Ilmu Pengetahuan &Teknologi - Buku Peraturan Perundang - undangan 10. Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: - Penataan Arsip - Penilaian dan Penyusutan arsip 11. Penyediaan alat-alat/perlengkapan 12. Penyediaan jasa sewa lahan/tanah/hewan/tanaman : sewa tanaman	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 10 0%	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 10 0%	925.378.850	1. a. 3.000 surat b. 5.000 surat c. 266 kali d. 2050 lembar 2. 12 bulan 3. a. 7 unit b. 14 unit 4. 12 bulan 5. 166 jenis 6. a.30 jenis b.153.340 lembar 7. 29 jenis 8. 38 jenis 9. a.5 jenis b.1 paket buku ilmu pengetahuan umum c. 1 paket Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi d. 2 paket Buku Peraturan perundang-undangan 10. a. 25 m/150 boks b. 25 m/125 boks	815.549.820	1. a. 3.500 surat b. 5.500 surat c. 240 kali d. 2550 lembar 2. 12 bulan 3. a. 5 unit b. 12 unit 4. 12 bulan 5. 168 jenis 6. a. 30 jenis b.155.390 lembar 7. 28 jenis 8. 34 jenis 9. a. 8 jenis b.1 paket c. - d. 1 paket 10. a. 175 boks b. 150 boks 11. 2 jenis 12. 12 bulan	1.057.985.680	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 10 0%	989.734.000	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 10 0%	1.039.220.000	Terwujudnya administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan 100 %	4.345.169.470	BAPPEDA DIY	DIY
			34	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan selama 12 bulan	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	63.665.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	63.665.000	BAPPEDA DIY	DIY
					1. Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan : a. Kinerja 15 orang pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	N/A	N/A	N/A	a.12 bulan b.12 bulan c.12 bulan d.11 bulan e.11 bulan f. 11 bulan	195.205.690	1. 12 bulan 2. 10 orang	226.000.000	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	236.045.000	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	247.847.000	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	1.115.186.210	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					b. Kinerja 3 orang pengelola barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku c. Kinerja 4 orang pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku d. Kinerja 2 orang pengelola arsip/perustakaan e. Kinerja 1 orang pengelola jaringan f. Kinerja 1 orang pengemudi  2. Tenaga Pendukung Perangkat Daerah							tugas dan fungsi SKPD 100%		tugas dan fungsi SKPD 100%		tugas dan fungsi SKPD 100%				
	35	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi		1. Penyediaan Makanan dan minuman rapat 12 bulan 2. Pelaksanaan koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya 12 bulan	Terwujudnya Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	Terwujudnya Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	1.033.616.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terwujudnya Administrasi perkantoran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 100%	1.033.616.000	BAPPEDA DIY	DIY
				1. Tersedianya makan dan minuman rapat 2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam Daerah 3. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Jawa) 4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar Daerah (Luar Jawa) 5. Konsultasi dan Koordinasi BAPPEDA Luar Negeri Terlaksana dengan Baik 6. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu: Penilaian Angka Kredit 7.Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu : Penerbitan Journal 8. Fasilitasi kegiatan pejabat fungsional tertentu: Pelaksanaan workshop/rapat kerja 9. Motivasi Kerja Pegawai Bappeda meningkat	N/A	N/A	N/A	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1.214.646.000	12 bulan.6900 os 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 kali penilaian 1 kali penerbitan 1 kali 150 orang	1.247.000.000	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	1.367.189.000	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	1.462.485.000	Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan pihak terkait 100%	6.071.278.000	BAPPEDA DIY	DIY	
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	1.011.010.350	100%	1.179.629.000	100%	1.357.218.450	100%	1.046.803.000	100%	974.186.000	100%	5.270.630.750	BAPPEDA DIY	DIY	
	108	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	277.222.350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersedianya peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 100%	277.222.350	BAPPEDA DIY	DIY
					Pengadaan: Komputer Note Book,Printer, UPS, Alat-alat Studio : Kamera, Soundsystem, Alat-alat Komunikasi : Pesawat Telepon , Faximili, Filling kabinet, Komputer PC,meja kerja staf, kursi kerja staf, sofa tamu kepala balai, kursi tunggu tamu, almari, meja rapat, kursi rapat, pompa air, air conditioner, LCD,Tabung pemadam kebakaran, CCTV	N/A	N/A	N/A	4 unit, 7 Unit, 13 Unit, 2 unit, 2 unit, 2 unit, 3 buah, 8 unit, 8 buah, buah, 1 set, 1 set	486.000.000	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan 1. Pengadaan komputer Note Book 3 unit 2. Pengadaan Air Conditioner5 unit	365.000.000	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	195.000.000	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	180.000.000	Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 100%	1.178.127.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											3. Pengadaan Printer warna5 unit 4. Komputer PC 1 unit 5. CCTV 1 paket 6. LCD 2 unit 7. Tabung Pemadam Kebakaran 2 unit 8. Almari arsip 2 unit 9. Meja Rapat 3 unit 10. Kursi Rapat 10 unit									
		109	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Gedung kantor terpelihara (2 unit)	Terpeliharanya rumah dan gedung 100%	Terpeliharanya rumah dan gedung 100%	279.978.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terpeliharanya rumah dan gedung 100%	279.978.000	BAPPEDA DIY	DIY
					Gedung kantor terpelihara	N/A	N/A	N/A	2 unit	280.000.000	4 unit	240.000.000	4 unit	313.854.000	4 unit	329.547.000	4 unit	1.162.401.000	BAPPEDA DIY	DIY
		111	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 1. Jaringan Komputer & Internet (1 paket) 2. Generator Set (1 unit) 3. Komputer PC (50 unit) 4. Printer (25 unit) 5. Komputer Note Book (15 unit) 6. Mesin Tik Manual (13 unit) 7. LCD proyektor (6 unit) 8. Sound System (4 unit) 9. Faksimile (2 unit) 10. CCTV (1 unit) 11. AC Split (52 unit) 12. AC Floor Standing (4 unit) 13.Tabung Pemadam Kebakaran (6 bh) 14. Almari besi (16 bh) 15. Filling Cabinet (16 bh) 16. Meja Kursi Tamu (3 set)	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	127.940.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 100%	127.940.000	BAPPEDA DIY	DIY
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 1. Jaringan Komputer & Internet 2. Generator Set 3. Komputer PC 4. Printer 5. Komputer Note Book 6. Mesin Tik Manual 7. LCD proyektor 8. Sound System 9. Faksimile 10. CCTV 11. AC Split 12. AC Floor Standing 13.Tabung Pemadam Kebakaran 14. Almari 15. Filling Cabinet 16. Meja Kerja 17. Kursi Kerja 18. Meja kursi tamu	N/A	N/A	N/A	2paket, 1 unit, 60 unit , 30 unit ,18 unit ,13 unit,7 unit, 4 unit, 2 unit, 1 unit, 57 unit, 4 unit, 6 bh, 21 bh, 21 bh, 30 bh, 5 unit	130.764.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor: 1. Jaringan komputer & internet (2 paket) 2. Generator set (1 unit) 3. Komputer PC (60 unit) 4. Printer (31 unit) 5. Komputer note book (20 unit) 6.Mesin tik manual (13 unit) 7. LCD proyektor (7 unit) 8. Sound system (5 unit) 9. Faksimile (3 unit)	144.290.400	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	137.283.000	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	144.147.000	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan 1 tahun 100%	551.769.400	BAPPEDA DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											10. CCTV (1 unit) 11. AC split (61 unit) 12. AC floor standing (4 unit) 13. Tabung pemadam kebakaran (6 bh) 14. Almari besi (23 bh), filling cabinet (19 bh) 15. Meja Kerja (30 unit)									
			112	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: 1. Kendaraan dinas roda 4 (13 unit) 2. Kendaraan dinas roda 2 (7 unit)	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	325.870.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	325.870.000	BAPPEDA DIY	DIY
					Kendaraan dinas/operasional terpelihara 1. Kendaraan dinas roda 4 2. Kendaraan dinas roda 2	N/A	N/A	N/A	14 unit 7 unit	282.865.000	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional: 1. Kendaraan dinas roda 4 (12 unit) 2. Kendaraan dinas roda 2 (5 unit)	392.928.050	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	400.666.000	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	320.492.000	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sesuai standar sarpras 100%	1.332.323.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bappeda: Rehabilitasi Depo Arsip	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Pengadaan ruang kerja 1 unit	215.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bappeda dan BPPSD DIY : pembangunan Depo Arsip	215.000.000	BAPPEDA DIY	DIY
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	527.389.020	100%	460.473.700	100%	812.175.700	100%	670.282.000	100%	731.760.000	100%	2.864.151.970	BAPPEDA DIY	DIY
			16	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja BAPPEDA (1 dokumen)	Nilai LKJIP A	Nilai LKJIP A	14.850.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Nilai LKJIP A	14.850.000	BAPPEDA DIY	DIY
					1. LKJIP BAPPEDA Tahun n-1 2. Bahan LKj dan LKPJ Bappeda Tahun n-1	N/A	N/A	N/A	1 dokumen laporan kinerja	16.335.000	1 dokumen LKJIP Tahun 2019 1 dokumen bahan laporan kinerja LKJ dan LKPJ Tahun 2019	19.600.000	Nilai LKJIP A	21.562.000	Nilai LKJIP A	23.718.000	Nilai LKJIP A	81.215.000	BAPPEDA DIY	DIY
			17	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan selama 12 bulan	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	20.936.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 100% tepat waktu	20.936.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target 8	Rp0 9	Target 10	Rp0 11	Target 12	Rp0 13	Target 14	Rp0 15	Target 16	Rp0 17	Target 18	Rp0 19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan : 1. Laporan Keuangan Semester 2. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan 3. Laporan Keuangan Audited 4. Laporan Keuangan bulanan	N/A	N/A	N/A	12 dokumen laporan keuangan	30.313.000	1. 2 laporan 2. 1 laporan 3. 1 laporan 4. 12 laporan	50.000.000	Tersusunnya laporan pertanggungjawaan keuangan 100% tepat waktu	44.352.000	Tersusunnya laporan pertanggungjawaan keuangan 100% tepat waktu	48.787.000	Tersusunnya laporan pertanggungjawaan keuangan 100% tepat waktu	173.452.000	BAPPEDA DIY	DIY
			18	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	1. Rencana Kerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda sejumlah 8 dokumen 2. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet) selama 12 bulan 3. Forum Perangkat Daerah 1 kali	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100% tepat waktu	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100% tepat waktu	363.531.320	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100% tepat waktu	363.531.320	BAPPEDA DIY	
					1. Rencana kerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda 2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun n+1 3. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun n 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun n+1 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun n 6. Renja Perangkat Daerah Tahun n+1 7. Renja Perangkat Daerah Perubahan Tahun n 8. ROPK Bappeda Tahun n+1 9. ROPK Bappeda Perubahan Tahun n 10. Pengelolaan Teknologi Informasi (pengelolaan website bappeda dan jaringan internet) 11. Forum Perangkat Daerah 12. Pengembangan Website Bappeda 13. Pengembangan sistem informasi internal 14. Profil Bappeda DIY	N/A	N/A	N/A	1. 8 dokumen perencanaan program/kegiatan Tahun 2019/2020 3. 1 dokumen usulan perencanaan program/kegiatan Bappeda DIY Tahun 2020 4. Update layout, Update konten, Penambahan dan penyesuaian menu dengan struktur baru, dan Update keamanan sistem 5. Fitur rekap per bidang, Notifikasi realisasi, Summary keuangan, Freeze baris atas pada ROPK dan movev, Kolom keluaran pada movev output dan Entri data minus	401.569.700	2. 1 dokumen RKA 2021 3. 1 dokumen RKA Perubahan 2020 4. 1 dokumen DPA 2021 5. 1 dokumen DPA Perubahan 2020 6. 1 dokumen Renja Tahun 2021 7. 1 dokumen Renja Perubahan Tahun 2020 8. 1 Dokumen ROPK 2020 9. 1 Dokumen ROPK Perubahan 2020 10. 12 bulan 11. 1 dokumen berita acara usulan perencanaan program/kegiatan Bappeda DIY Tahun 2020 13. 1 aplikasi 14. 1 paket	401.569.700	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	588.190.000	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	641.459.000	1. Tersusunnya dokumen perencanaan 100% tepat waktu 2. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi 100%	2.021.365.950	BAPPEDA DIY	DIY
			19	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Dokumen laporan movev BAPPEDA sejumlah 1 dokumen	Tersusunnya Laporan Movev BAPPEDA 100% tepat waktu	Tersusunnya Laporan Movev BAPPEDA 100% tepat waktu	11.141.700	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tersusunnya Laporan Movev BAPPEDA 100% tepat waktu	11.141.700	BAPPEDA DIY	DIY



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggung- awab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target 8	Rp0 9	Target 10	Rp0 11	Target 12	Rp0 13	Target 14	Rp0 15	Target 16	Rp0 17	Target 18	Rp0 19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					1. Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA bulanan 2. Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV 3. Dokumen laporan Monev Bappeda Tahunan	N/A	N/A	N/A	1 dokumen laporan Monev Bappeda	12.256.000	12 dokumen laporan monev BAPPEDA bulanan 4 dokumen laporan timbal balik 1 dokumen laporan Monev Bappeda tahunan	14.000.000	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA 100% tepat waktu	16.178.000	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA 100% tepat waktu	17.796.000	Tersusunnya Laporan Monev BAPPEDA 100% tepat waktu	60.730.000	BAPPEDA DIY	DIY
		21	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu - Penilaian Angka Kredit (2 kali) - Penerbitan Journal (1 kali)	Terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	Terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	116.930.000	N/A	N/A	1.Fasilitas kegiatan pejabat fungsional tertentu: - 2 kali Penilaian Angka Kredit 2. Fasilitas kegiatan pejabat fungsional tertentu: 1 kali Penerbitan Journal	119.306.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pembinaan, pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu 100%	236.236.000	BAPPEDA DIY	DIY	
			Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur	Motivasi kerja pegawai Bappeda meningkat	Motivasi kerja pegawai Bappeda meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	Motivasi Kerja Pegawai Bappeda meningkat 150 orang	207.700.000	145 orang	91.350.000	145 orang	99.200.000	145 orang	190.550.000	BAPPEDA DIY	DIY	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	15.824.414.273	100%	18.640.543.524	100%	34.464.957.797	BAPPEDA DIY	DIY		
				2. Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran							100%		100%		100%					
				3. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur							100%		100%		100%					
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan 50% thd Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.777.000	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.763.500	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	299.540.500	BAPPEDA DIY	DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Forum Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 2023 3. Renja Perangkat Daerah Perubahan 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	205.380.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	15.721.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	221.101.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1. DPA 2023 2. DPA-P 2022 3. RKA 2023 4. RKA-P 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	12.365.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	25.043.500	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	37.408.500	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Bahan LKJ dan LKPJ Perangkat Daerah Tahun 2021 2. Dokumen Laporan Monev Bappeda Tahunan 3. Dokumen Laporan Monev Bappeda Bulanan 4. Dokumen Laporan Timbal Balik Triwulan I-IV 5. LKjIP Perangkat Daerah 2021 6. ROPK Perangkat Daerah 2022 7. ROPK Perangkat Daerah Perubahan 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 2 dokumen 2. 1 dokumen 3. 12 dokumen 4. 4 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen	12.032.000	1. 2 dokumen 2. 1 dokumen 3.12 dokumen 4. 4 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen	28.999.000	1. 2 dokumen 2. 1 dokumen 3. 12 dokumen 4. 4 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen	41.031.000	BAPPEDA DIY	DIY		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukungan 50% thd Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13.649.048.573	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16.726.732.532	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	30.375.781.105	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda dan BPPSD DIY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	13.574.758.573	12 bulan	16.658.432.532	12 bulan	30.233.191.105	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pengelolaan keuangan Bappeda DIY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	46.990.000	12 bulan	34.900.000	12 bulan	81.890.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan gaji Bappeda DIY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		12 bulan	3.300.000	12 bulan	3.300.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Koordinasi dan	1. Laporan Keuangan Tahunan Gabungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		1. 1 dokumen 2. 1 dokumen	7.134.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen	7.134.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2. Laporan Keuangan Thaunan Gabungan Audited															
				Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1. Laporan Keuangan bulanan 2. Laporan Keuangan Semester		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.12 dokumen 2.2 dokumen	27.300.000	1.12 dokumen 2.2 dokumen	22.966.000	1.12 dokumen 2.2 dokumen	50.266.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan 50% thd Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.045.810.250	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.106.278.400	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.152.088.650	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 jenis	13.620.000	7 jenis	13.620.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Alat Tulis Kantor 2. Kertas dan Cover	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 45 jenis 2. 4 jenis	201.340.000	1. 45 jenis 2. 4 jenis	50.412.500	1. 45 jenis 2. 4 jenis	251.752.500	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 jenis	43.774.000	18 jenis	43.774.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Barang Cetakan 2. Penggandaan surat-surat/ dokumen lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 10 jenis 2. 73.338 lembar	45.074.500	1. 10 jenis 2. 73.338 lembar	45.074.500	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 jenis	7.800.000	4 jenis	7.800.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Langganan akun teleconference 2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dalam daerah 3. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa) 4. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah (Luar Jawa) 5. Pengelolaan Arsip Dinamis Arsip Dinas SKPD : Penataan Arsip	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan 5. 12 bulan 6. 12 bulan	844.470.250	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan 5. 12 bulan 6. 12 bulan	658.454.000	1. 12 bulan 2. 12 bulan 3. 12 bulan 4. 12 bulan 5. 12 bulan 6. 12 bulan	1.502.924.250	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun				
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					6. Tersedianya makan dan minum rapat																
				Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan system informasi internal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85.803.400	1 aplikasi	85.803.400	BAPPEDA DIY	DIY	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya penatausahaa n barang milik daerah pada SKPD	16.040.750	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	16.040.750	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah dengan baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	16.040.750	12 bulan	16.040.750	BAPPEDA DIY	DIY	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	95.714.000	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	95.714.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : 1.Workshop/Rapat Kerja Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu 2. Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : 2.Penilaian Angka Kredit 3. Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : 3.Penerbitan Jurnal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 kali 2. 2 kali 3. 1 kali	95.714.000	1. 1 kali 2. 2 kali 3. 1 kali	95.714.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan 50% thd Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.984.450	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	822.538.592	BAPPEDA DIY	DIY		
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9200 surat 7200 surat 52 kali 470 buah	6.000.000	9200 surat 7200 surat 52 kali 470 buah	6.000.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan dan peralatan untuk jasa pelayanan umum kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20 jenis	533.984.450	20 jenis	282.554.142	12 bulan	816.538.592	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Dukungan 100% thd Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	27.771.000	Terlaksananya pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	27.771.000	BAPPEDA DIY	DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pemerintah Daerah																
				Pengadaan mebel	Rak arsip	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 unit	9.760.000	5 unit	9.760.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1. camera video conference 2. webcam 3. speaker aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 2 unit 2. 2 buah 3. 4 buah	18.011.000	1. 2 unit 2. 2 buah 3. 4 buah	18.011.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukungan 100% thd Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	365.794.000	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan dan mesin lainnya, mebel, dan sarana prasaran gedung kantor lainnya	458.886.800	Terlaksananya pemeliharaa n gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan dan mesin lainnya, mebel, dan sarana prasaran gedung kantor lainnya	824.680.800	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1. Kendaraan dinas/operasional terpelihara : Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)  2. Kendaraan dinas/operasional terpelihara : Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 2 unit 2. 12 unit	210.711.000	1. 1 unit 2. 1 unit	31.019.000	1. 1 unit 2. 1 unit	241.730.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas operasional roda 4 (empat) 2. Bukti Pembayaran Pajak/ Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 unit 10 unit	224.465.000	10 unit 10 unit	224.465.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pemeliharaan Generator set	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	10.148.000	1 unit	10.148.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																
				Sub kegiatan Pemeliharaan mebel	1. Pemeliharaan meja kursi tamu 2. Pemeliharaan almari 3. Pemeliharaan filing cabinet 4. Pemeliharaan kursi 5. Pemeliharaan meja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 set 10 buah 10 buah 27 unit 25 unit	14.595.000	1 set 10 buah 10 buah 27 unit 25 unit	14.595.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18 jenis	85.195.000	18 jenis	43.850.000	18 jenis	129.045.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	69.888.000	1 unit	99.690.800	1 unit	169.578.800	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Pemeliharaan AC floor standing 2. Pemeliharaan AC split 3. Pemeliharaan tabung pemadam kebakaran 4. Pemeliharaan CCTV	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 unit 39 unit 6 unit 1 tahun	35.119.000	4 unit 39 unit 6 unit 1 tahun	35.119.000	BAPPEDA DIY	DIY
						N/A														
	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase perencanaan yang berkualitas	100 %	100 %	3.932.091.300	100 %	2.309.219.200	100 %	2.550.000.000	100 %	2.550.000.000	100 %	2.650.000.000	100 %	13.610.337.500	BAPPEDA DIY	DIY
					Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1. Dokumen RKPD sebagai dasar penyusunan KUA PPAS 2. Dokumen RKPDP sebagai dasar Penyusunan KUPA PPASP 3. Dokumen KUA PPAS sebagai Dasar Penyusunan RAPBD 4. Dokumen KUPA PPASP sebagai dasar Penyusunan RAPBDP 5. Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan)	N/A	N/A	N/A	1. 1 Dokumen RKPD 2020 2. 1 Dokumen RKPDP 2019 3. 1 Dokumen KUA PPAS 2020 4. 1 Dokumen KUA PPASP 2019 5. Fitur Renstra Perangkat Daerah, Fitur SDG'S, Filter tematik, Fitur Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Filter pengarusutamaan gender	2.036.792.200	1. RKPD 2021 sbg dasar penyusunan KUA PPAS 2. RKPDP sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP 3. KUA PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD 4. KUPA PPASP sebagai dasar penyusunan RAPBDP 5. Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogjaplan) 6. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2022-2027 1 dokumen	2.250.000.000	1. Tersusunnya a dokumen perencanaan antara lain: RKPD, RKPDP, KUA PPAS dan KUPA PPAS (Penghantaran dan Penetapan) sesuai ketentuan berlaku waktu dan selaras RPJMD) sebagai Dasar Penyusunan RAPBD dan sebagai Dasar Penyusuna n RAPBD dan sebagai Dasar Penyusuna	2.143.198.000	1. Tersusunnya a dokumen perencanaan antara lain: RKPD, RKPDP, KUA PPAS dan KUPA PPAS (Penghantaran dan Penetapan) sesuai ketentuan berlaku waktu dan selaras RPJMD) sebagai Dasar Penyusuna n RAPBD dan sebagai Dasar Penyusuna	2.202.518.000	1. Tersusunnya dokumen perencanaan antara lain: RKPD, RKPDP, KUA PPAS dan KUPA PPAS (Penghantaran dan Penetapan) sesuai ketentuan berlaku waktu dan selaras RPJMD) sebagai Dasar Penyusunan RAPBD dan sebagai Dasar Penyusunan RAPBD Perubahan	8.370.018.200	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target 8	Rp0 9	Target 10	Rp0 11	Target 12	Rp0 13	Target 14	Rp0 15	Target 16	Rp0 17	Target 18	Rp0 19		
1	2	3	4	5	6	7													20	21
																</				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dukungan 100% terhadap Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.387.235.000	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.564.776.250	Terlaksananya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	4.952.011.250	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2023 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah 2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2024 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen	127.419.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen	127.419.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2022 yang berisi mengenai program prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah 2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2023 yang berisi mengenai program prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen	133.606.000	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen	133.606.000	BAPPEDA DIY	DIY	
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1. Dokumen Ranwal RPJMD DIY 2022-2027 2. Dokumen RKPDP 2023 sbg dasar penyusunan KUA PPAS 3. Dokumen RKPDP 2022 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP 4. Fasilitasi Penyusunan Renja 5. Fasilitasi Penyusunan Renstra  Pengembangan Aplikasi Perencanaan (Jogiaplan)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen  1 aplikasi	2.253.629.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen  1 aplikasi	2.437.357.250	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen  1 aplikasi	4.690.986.250	BAPPEDA DIY	DIY	
	22			Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	81,30%	83,72%	825.104.000	84,78%	1.121.421.000	86,96%	1.250.000.000	86,96%	1.060.935.300	91,30%	1.217.028.000	91,30%	4.630.546.300	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Perencanaan,	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	N/A	N/A	N/A	1. 1 Dokumen Perencanaan	766.974.000	1 Dokumen Perencanaan	825.000.000	Tersusunnya dokumen	455.935.300	Tersusunnya dokumen	551.528.000	Tersusunnya dokumen	1.981.261.300	BAPPEDA DIY	DIY



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2 4. Masterplan Agriculture 5. Masterplan Aquaculture 6. Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi 7. Dokumen RAD PG 2020-2025				dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2019 2. 1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2018 3. 1 Dokumen perencanaan 2021 4. 1 Dokumen Masterplan Agriculture 5. 1 Dokumen Masterplan Aquaculture		dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2020 dan 2021 2. 1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2019 3. 1 Dokumen perencanaan 2022 6. 1 Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2020 7. 1 Dokumen RAD PG 2020-2025		Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen		Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen		Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen			
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2 4. Updating aplikasi potensi usaha 5. Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi	N/A	N/A	N/A	1. 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Tahun 2019 2. 1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2018 3. 1 Dokumen perencanaan 2021 4. Penambahan menu pelaporan dan pembaruan data base	314.015.000	1. 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Dunia Usaha Tahun 2020 dan 2021 2. 1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2019 3. 1 Dokumen perencanaan 2022 5. 1 Dokumen Kajian Penyusunan Percepatan Pertumbuhan Inklusi	425.000.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	605.000.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	665.500.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pertanian dan Kelautan sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	1.783.749.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2019	N/A	N/A	N/A	1 dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2019	40.432.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2019	40.432.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	86,96%	345.575.000	91,30%	216.722.000	91,30%	562.297.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target 8	Rp0 9	Target 10	Rp0 11	Target 12	Rp0 13	Target 14	Rp0 15	Target 16	Rp0 17	Target 18	Rp0 19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dukungan 100 % terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian 91,30%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	345.575.000	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	216.722.000	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	562.297.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 2. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 3. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Perekonomian Subbidang Dunia Usaha 4. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Perekonomian Subbidang Pertanian dan Kelautan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	279.984.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	139.538.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	419.522.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2021 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2021 3. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Dunia Usaha Tahun 2022 4. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra subbidang Pertanian dan Kelautan Tahun 2022 5. Dokumen hasil Monev RAD Pangan dan Gizi Tahun 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen	65.591.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	77.184.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	142.775.000	BAPPEDA DIY	DIY
			23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sosial Budaya	89,35%	89,74%	1.690.316.500	89,87%	1.357.159.000	91,14%	1.550.000.000	92,41%	1.805.001.000	93,67%	2.200.000.000	93,67%	7.799.162.500	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Perencanaan,	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	N/A	N/A	N/A	1. 1 Dokumen Perencanaan	190.000.000	1. Dokumen Perencanaan	210.000.000	Tersusunnya dokumen	230.210.000	Tersusunnya dokumen	253.231.000	Tersusunnya dokumen	756.796.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	Subbidang SDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2				dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM Tahun 2019 2. 1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM Tahun 2018 3. 1 Dokumen perencanaan 2021		dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS tahun n, 1 dokumen 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang SDM tahun n-1, 1 dokumen 3. Dokumen perencanaan n+2, 1 dokumen		Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen		Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen		Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang SDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen			
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 2. Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	N/A	N/A	1. 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra Tahun 2019 2. 1 Dokumen Evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra Tahun 2018 3. 1 Dokumen perencanaan 2021	461.509.000	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS tahun n, 1 dokumen 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra subbidang Kesra tahun n-1,1 dokumen 3. Dokumen perencanaan n+2,1 dokumen	650.000.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	714.004.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	999.904.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Kesra sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	2.308.867.000	BAPPEDA DIY	DIY
			052	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Budaya	1.Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Budaya sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n sejumlah 1 Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev Sektor Budaya (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Budaya sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Budaya sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan	104.147.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Monev sub Bidang Budaya sebagai Bahan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun	104.147.500	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun n+1 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun n) sejumlah 1 dokumen	KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu										n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu			
				Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	1. Dokumen Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY 2. Dokumen evaluasi CSR/TSLP 3. Dokumen monev TPB DIY 4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan	N/A	N/A	N/A	1. 1 Dokumen Evaluasi Penanggulangan an Kemiskinan DIY Tahun 2019 2. 1 Dokumen evaluasi CSR/TSLP Tahun 2019 3. 1 Dokumen monev RAD TPB DIY Tahun 2019 4. Pengembangan surface dan fitur data base menyesuaikan SIKS NG Kementrian Sosial	705.650.000	1. Dokumen Evaluasi penangulugan an Kemiskinan DIY, 1 dokumen 2. Dokumen Evaluasi CSR/TSLP, 1 dokumen 3. Dokumen Monev TPB DIY, 1 dokumen 4. Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Penangulugan an Kemiskinan	690.000.000	Tersusunnya Bahan rekomendasi kebijakan untuk pencapaian 17 tujuan RAD TPB sebanyak 3 dokumen Terlaksananya pengembangan aplikasi untuk mendukung penangulugan kemiskinan sebanyak 1 aplikasi	860.787.000	Tersusunnya Bahan rekomendasi kebijakan untuk pencapaian 17 tujuan RAD TPB sebanyak 3 dokumen Terlaksananya pengembangan aplikasi untuk mendukung penangulugan kemiskinan sebanyak 1 aplikasi	946.865.000	Tersusunnya Bahan rekomendasi kebijakan untuk pencapaian 17 tujuan RAD TPB sebanyak 3 dokumen Terlaksananya pengembangan aplikasi untuk mendukung penangulugan kemiskinan sebanyak 1 aplikasi	3.043.183.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan n Daerah	2. Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92,41%	543.925.950	93,67%	1.270.594.500	93,67%	1.814.520.450	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dukungan 100 % terhadap Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan 93,24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	543.925.950	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1.270.594.500	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	1.814.520.450	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target 8	Rp0 9	Target 10	Rp0 11	Target 12	Rp0 13	Target 14	Rp0 15	Target 16	Rp0 17	Target 18	Rp0 19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 2. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 3. Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM 4. Dokumen bahan perencanaan tahun 2024 Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat 5. Dokumen Rencana Sinkronisasi Program/Kegiatan CSR/TSLP dan Pemd	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen	158.535.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen	194.600.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen	353.135.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2021 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2021 3. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang SDM tahun 2022 4. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pembangunan Manusia Subbidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2022 5. Dokumen evaluasi CSR/TSLP 6. Dokumen evaluasi Penanggulangan Kemiskinan DIY 7. Dokumen Monev TPB DIY 8. Pengembangan aplikasi sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen 8. 1 aplikasi	385.390.950	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen 8. 1 aplikasi	800.800.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 dokumen 6. 1 dokumen 7. 1 dokumen 8. 1 aplikasi	1.186.190.950	BAPPEDA DIY	DIY
			23	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	76,42%	77,14%	1.404.762.850	80,00%	856.030.000	82,86%	1.250.000.000	85,71%	1.323.304.000	88,57%	1.555.634.000	88,57%	5.356.470.850	BAPPEDA DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n, 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra SubbidangPerhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	N/A	N/A	1. 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2019 2. 1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra SubbidangPerhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2018 3. 1 Dokumen Dokumen perencanaan 2021	250.000.000	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPAPPAS Tahun n, 1 dokumen 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra SubbidangPerhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun n-1, 1 dokumen 3. Dokumen perencanaan n+2, 1 dokumen 4. 1 dokumen Kajian Infrastruktur pendukung Kawasan Pariwisata di DIY	425.000.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW dan ESDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	592.500.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW dan ESDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	751.750.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang PIW dan ESDM sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	1.669.090.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1.Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2 4. Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	N/A	N/A	N/A	1. 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 2. 1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun 2018	460.000.000	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n sebanyak 1 dokumen	825.000.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	730.804.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu	803.884.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	2.136.588.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									3. 1 Dokumen Perencanaan 2021		2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Tahun n-1 sebanyak 1 dokumen 3. Dokumen perencanaan n+2 sebanyak 1 dokumen 4. 1 Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 5. 1 Dokumen Peraturan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon		sebanyak 3 dokumen		sebanyak 3 dokumen					
				Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD Gas Rumah Kaca	Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2019	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2019	146.030.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2019	146.030.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,71%	138.320.000	88,57%	229.440.000	88,57%	412.760.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dukungan 50 % terhadap Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Sarana Prasarana 88,57 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	138.320.000	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	229.440.000	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	412.760.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
		Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 2. Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM 3. Dokumen Kajian Pengembangan Infrastruktur Strategis jangka menengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	51.607.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	39.000.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	90.607.000	BAPPEDA DIY	DIY	
		Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2021 2. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tahun 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen	20.193.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen	23.000.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen	43.193.000	BAPPEDA DIY	DIY	
		Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD tahun 2022 2. Dokumen bahan perencanaan 2024 Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	54.327.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	156.559.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	210.886.000	BAPPEDA DIY	DIY	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					3. Dokumen KLHS RPJMD DIY Tahun 2023-2028															
				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Sarana Prasarana Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 2. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Subbidang Pertanahan, Tata Ruang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 3. Dokumen Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	12.193.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	10.881.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen	23.074.000	BAPPEDA DIY	DIY
			27	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan	88,72 %	90,14%	915.482.650	90,50%	704.925.060	91%	765.000.000	91,55%	1.248.618.000	92,96%	1.373.480.000	92,96%	4.543.214.710	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	N/A	N/A	1. 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2019 2. 1 Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2018 3. 1 dokumen Dokumen perencanaan 2021	465.535.060	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Pemerintahan Umum Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	515.000.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	946.118.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	1.040.730.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Pemerintahan Umum sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen	2.613.762.060	BAPPEDA DIY	DIY
				Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPd dan KUPA-PPAS Tahun n 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun n-1 3. Dokumen perencanaan n+2	N/A	N/A	N/A	1. 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2019 2. 1 Dokumen evaluasi capaian program OPD	239.390.000	1. Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-PPAS	250.000.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan	302.500.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan	332.750.000	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Subbidang Administrasi Publik sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPd dan KUA-	1.013.970.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun 2018 3. 1 Dokumen perencanaan 2021		Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n, 1 dokumen 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Subbidang Administrasi Publik Tahun n-1, 1 dokumen 3. Dokumen perencanaan n+2, 1 dokumen		KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen		KUA-PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen		PPAS Tahun n+1, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun n 100% Tepat Waktu sebanyak 3 dokumen			
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91,55%	250.178.000	92,96%	275.194.500	92,96%	525.372.500	BAPPEDA DIY	DIY
				Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dukungan 100 % terhadap Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan 93,24%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	250.178.000	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	275.194.500	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	525.372.500	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 2. Dokumen bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Tahun 2022 3. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	184.564.500	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	203.020.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	387.584.500	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					4. Dokumen bahan perencanaan Tahun 2024 Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik															
				Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2021 2. Dokumen evaluasi capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2021 3. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan Umum Tahun 2022 4. Dokumen hasil monitoring capaian program OPD mitra Bidang Pemerintahan Subbidang Administrasi Publik Tahun 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	65.613.500	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	72.174.500	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen	137.788.000	BAPPEDA DIY	DIY
			28	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan SKPD	87%	88%	2.165.895.200	89%	1.928.582.500	90%	2.539.365.000	91%	2.450.000.000	92%	2.695.000.000	92%	11.119.278.700	BAPPEDA DIY	DIY
					Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi	1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun n-1 dan TWI-III/ Tahun n 2. Laporan evaluasi: a. Hasil RPJMD DIY Tahun n-1 b. Hasil RKPD DIY c. Hasil Renstra OPD DIY Tahun n-1 d. Hasil Renja OPD DIY e. Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun n-1, f. Hasil RKPD Kab/Kota g. Hasil Program Pemda h. Kebijakan Perencanaan Tahunan 3. Update e-Monev /web Sengguh	N/A	N/A	N/A	1. a. 1 dokumen Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/ko ta TW IV/ Tahun 2018 b. 3 dokumen Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/ko ta TWI-III/ Tahun 2019 2. a. 1 dokumen laporan evaluasi hasil RPJMD DIY s.d Tahun 2018, b. 1 dokumen laporan evaluasi hasil RKPD DIY s.d semester 2 tahun 2018 c. 1 dokumen laporan evaluasi hasil Renstra OPD DIY s.d Tahun 2018	N/A	1.467.292.500	1. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun n-1 sebanyak 1 dokumen dan TWI-III/ Tahun n sebanyak 3 dokumen 2. Laporan evaluasi: -hasil RPJMD DIY s.d Tahun n-1 sebanyak 1 dokumen , - Hasil RKPD DIY sebanyak 1 dokumen , - Hasil Renstra OPD DIY s.d Tahun n-1, sebanyak 1 dokumen, - Hasil Renja OPD DIY sebanyak 1 dokumen, -Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun n-1, sebanyak 1 dokumen, -Hasil RKPD Kab/Kota	1.889.365.000	1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/ko ta 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik perencanaan/p elaksanaan pembangunan selanjutnya membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 8 dokumen 3. Terlaksananya pengembangan aplikasi digunakan sebagai instrumen membantu pengendalian dan evaluasi	1.891.819.000	1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/ko ta 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik perencanaan/ pelaksanaan pembangunan selanjutnya membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 8 dokumen 3. Terlaksananya pengembangan aplikasi digunakan sebagai instrumen membantu pengendalian dan evaluasi	2.081.000.000	1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/ko ta 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik perencanaan/p elaksanaan pembangunan selanjutnya membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 8 dokumen 3. Terlaksananya pengembangan aplikasi digunakan sebagai instrumen membantu pengendalian dan evaluasi	6.895.046.500	BAPPEDA DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target 8	Rp0 9	Target 10	Rp0 11	Target 12	Rp0 13	Target 14	Rp0 15	Target 16	Rp0 17	Target 18	Rp0 19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									d. 1 dokumen laporan evaluasi hasil Renja OPD DIY s.d semester 2 tahun 2018 e. 1 dokumen laporan evaluasi hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2018, f. 1 dokumen laporan evaluasi hasil RKPD Kab/Kota s.d semester 2 tahun 2018 g. 1 dokumen laporan hasil evaluasi Program Pemda h. 1 dokumen laporan evaluasi Kebijakan RKPD 3. 2 Aplikasi: a. Fitur pengembangan logframe dan KAK, Fitur pengembangan PKKI, Fitur Pengembangan Inovasi, Fitur Pengembangan aplikasi untuk danais b. fitur penyesuaian dengan sistem monev Bappenas (emon 3)		sebanyak 1 dokumen, -Hasil Program Pemda sebanyak 1 dokumen -Kebijakan RKPD 1 dokumen - Evaluasi Hasil RPJPD DIY sebanyak 1 Dokumen 3. Update e-Monev APBD dan e-Monev APBN, sebanyak 2 aplikasi		untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi		untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi		yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi			
				Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun n-1 2. Dokumen LKJ Pemda DIY Tahun n-1 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun n 4. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun n-1 5. Laporan Kinerja APBN TW IV (Tahun n-1) dan TW I-III (Tahun n) 6.Draf Rapergub Pengendalian Pembangunan 7. Video Akuntabilitas Kinerja DIY 8. Penyerahan DIPA APBN Tahun 2021	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2018 2. 1 dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2018 3. 1 dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2019 4. 1 dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018	461.290.000	1. Laporan Kinerja APBN 2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur 3. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 4. Laporan Penilaian Capaian Kinerja 5. Dokumen LKj Pemda DIY 6. Dokumen LKPJ Gubernur	650.000.000	1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik perencanaan/	558.181.000	1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik perencanaan/	614.000.000	1. Tersusunnya Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah PA/KPA DIY dan kabupaten/kota 4 triwulan sebanyak 4 dokumen. 2. Tersusunnya hasil evaluasi dokumen perencanaan tepat waktu, sebagai umpan balik pelaksanaan pembangunan selanjutnya	2.058.337.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggung- jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									5. 1 dokumen Laporan Kinerja APBN TW IV (Tahun 2018) dan 3 dokumen Laporan Kinerja APBN TW I-III (Tahun 2019)		7. Pembuatan Video Akuntabilitas Kinerja DIY		pelaksanaan pembangunan selanjutnya membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 8 dokumen 3.Terlaksanan ya pengembanga n aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi		pelaksanaan pembangunan selanjutnya membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 8 dokumen 3.Terlaksanan ya pengembanga n aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi		membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 8 dokumen 3.Terlaksananya a pengembangan aplikasi digunakan sebagai instrumen untuk membantu pengendalian dan evaluasi yang akuntabel sebanyak 2 aplikasi			
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembanguna n Daerah	1. Persentase Capaian Kegiatan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91%	2.017.005.350	92%	1.865.468.500	92%	3.882.473.850	BAPPEDA DIY	DIY
					2. Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu sesuai Regulasi yang berlaku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%		100%		100%			
				Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Dukungan 100% thd Persentase Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Tepat Waktu sesuai Regulasi Yang Berlaku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.017.005.350	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.865.468.500	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi, Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3.882.473.850	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	1. Penyerahan DIPA APBN Tahun 2023 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen	73.390.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen	46.825.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 4 dokumen	120.215.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pembangunan Daerah di Provinsi	3. Laporan Kinerja APBN (dekon/TP) triwulan IV/2021 dan Triwulan I-III/2022															
				Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kab/Kota Tahun 2022 2. Dokumen LKPJ DIY Tahun 2021 3. Dokumen LKPJ AMJ DIY Tahun 2017-2022 4. Laporan evaluasi Hasil Program Pemda Tahun 2021 5. Laporan evaluasi Hasil Renja OPD DIY Semester II/Tahun 2021 dan Semester I/2022 6. Laporan evaluasi Hasil Renstra OPD DIY Tahun 2021 7. Laporan evaluasi Hasil RKPD DIY Semester II/ 2021 dan Semester I/2022 8. Laporan evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2021 9. Laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan 10. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2021 dan TW I-III 2022 11. Updating Sengguh Tahun 2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 2 dokumen 6. 1 dokumen 7. 2 dokumen 8. 1 dokumen 9. 1 dokumen 10. 4 dokumen 11. 1 aplikasi	1.857.265.350	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 2 dokumen 6. 1 dokumen 7. 2 dokumen 8. 1 dokumen 9. 1 dokumen 10. 4dokumen 11. 1 aplikasi	1.760.488.500	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 2 dokumen 6. 1 dokumen 7. 2 dokumen 8. 1 dokumen 9. 1 dokumen 10. 4dokumen 11. 1 aplikasi	3.617.753.850	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab/Kota Semester II/2021 dan Semester I/2022 2. Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kab/Kota Tahun 2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 2 dokumen 2. 1 dokumen	86.350.000	1. 2 dokumen 2. 1 dokumen	58.155.000	1. 2 dokumen 2. 1 dokumen	144.505.000	BAPPEDA DIY	DIY
			32	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian realisasi pelaksanaan keistimewaan program	N/A	100%	3.171.412.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	3.171.412.000	BAPPEDA DIY	DIY
			1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Materi Program/ Kegiatan sebagai Bahan Usulan dana Keistimewaan	N/A	100%	1.171.412.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1.171.412.000	BAPPEDA DIY	
					Materi Program/ Kegiatan sebagai Bahan Usulan dana Keistimewaan	N/A	100%	1.216.412.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1.216.412.000		
			2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Laporan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah dalam rangka Keistimewaan	N/A	100%	2.000.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	2.000.000.000	BAPPEDA DIY	DIY
					Laporan pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah dalam rangka Keistimewaan	N/A	100%	2.013.625.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	2.013.625.000		
				Program Penyelenggara n Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan	Persentase capaian realisasi pelaksanaan keistimewaan program	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	816.506.000	100%	816.506.000	BAPPEDA DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY																
				Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terlaksananya Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	816.506.000	100%	816.506.000	BAPPEDA DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Facilitasi Penyiapan Visi dan Misi Gubernur DIY Tahun 2017-2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	816.506.000	1 dokumen	816.506.000	BAPPEDA DIY	DIY

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Menjadi institusi perencanaan yang bernilai tinggi Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Persentase ketercapaian pembangunan daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	1.692.691.183	100%	1.692.691.183	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, dan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	1.481.864.135	12 bulan	1.481.864.135	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN BPPSD DIY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	1.460.984.135	12 bulan	1.460.984.135	BPPSD DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pengelolaan keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	17.940.000	12 bulan	17.940.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan gaji	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	2.940.000	12 bulan	2.940.000	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	3.900.000	12 bulan	3.900.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	3.900.000	12 bulan	3.900.000	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	97.736.000	100%	97.736.000	BPPSD DIY	DIY	
				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6 jenis	697.000	6 jenis	697.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Kertas dan Cover	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 55 jenis 2. 4 jenis	19.811.000	1. 55 jenis 2. 4 jenis	19.811.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 jenis	6.994.000	12 jenis	6.994.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 jenis	4.070.000	4 jenis	4.070.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Surat kabar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 jenis	3.120.000	2 jenis	3.120.000	BPPSD DIY	DIY



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											PD penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun				
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target			Rp0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Perundang-undangan																	
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Tersedianya makanan dan minuman rapat 2. Pengelolaan arsip dinamis arsip dinas SKPD : penataan arsip 3. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi 4. Penyediaan akun penyelenggaraan rapat online	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 12 bulan 2. 20 box 3. 12 bulan 4. 12 bulan	63.044.000	1. 12 bulan 2. 20 box 3. 12 bulan 4. 12 bulan	63.044.000	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	3.261.000	100%	3.261.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Printer	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	3.261.000	100%	3.261.000	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	50.397.048	100%	50.397.048	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Penyediaan jasa surat menyurat dan benda pos : surat masuk 2. Penyediaan jasa surat menyurat dan benda pos : surat keluar 3. Penyediaan jasa surat menyurat dan benda pos : materai 4. Penyediaan jasa surat menyurat dan benda pos : jasa pengiriman	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 500 buah 2. 500 buah 3. 100 buah 4. 5 kali	9.100.000	1. 500 buah 2. 500 buah 3. 100 buah 4. 5 kali	9.100.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan rekening telepon	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	1.425.840	12 bulan	1.425.840	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : Pembersihan Kantor UPT Bappeda DIY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	39.871.208	12 bulan	39.871.208	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	55.533.000	100%	55.533.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : Pembayaran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 unit 2. 1 unit	16.991.000	1. 1 unit 2. 1 unit	16.991.000	BPPSD DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 2. Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara : Kendaraan Dinas Roda 4															
				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jaringan computer 2. Komputer PC 3. Printer 4. Notebook 5. Kamera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 unit 2. 8 unit 3. 5 unit 4. 3 unit 5. 1 unit	8.740.000	1. 1 unit 2. 8 unit 3. 5 unit 4. 3 unit 5. 1 unit	8.740.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung BPPSD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	25.200.000	1 unit	25.200.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Pemeliharaan AC split 2. Pemeliharaan tabung pemadam kebakaran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 4 unit 2. 2 unit	4.602.000	1. 4 unit 2. 2 unit	4.602.000	BPPSD DIY	DIY
	16	Program Pengembangan Statistik Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	1.261.753.900	100 %	2.117.234.500	100 %	1.430.000.000	100 %	1.679.393.000	100 %	1.847.333.000	100 %	8.053.624.400	BPPSD DIY	DIY	
					Tingkat kepuasan pelanggan	67,13 %	68,00%		69,00%		70,00%		71,00%		72,00%		72,00 %			
			Penyediaan Data Statistik	1. Dokumen Analisis PDRB sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 2. Dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 3. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan 4. Dokumen Analisis IPM per Kecamatan sebagai bahan pendukung perencanaan 5. Dokumen Analisis Ketimpangan Daerah DIY 6. Dokumen Analisis Kemiskinan DIY 7. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian 8. Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen Analisis PDRB DIY 2014-2018 2. 1 dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY 2014-2018 3. 1 dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY 2018 4. 1 dokumen Analisis IPM per Kecamatan 2018	1.388.888.000	1. 1 dokumen Analisis PDRB 2. 1 dokumen Analisis ICOR DIY 3. 1 dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY 4. 1 dokumen Analisis Kemiskinan 5. 1 dokumen Analisis Ketimpangan Daerah 6. 1 dokumen Analisis Ketenagakerjaan	650.000.000	Tersusunnya Dokumen (Analisis PDRB, Analisis ICOR, Analisis Makro ekonomi DIY, Dokumen Analisis Kualitas Pembangunan dan Tingkat Kesejahteraan Daerah, Dokumen Analisis Data Kinerja Daerah & Perangkat Daerah) dan selesai tepat waktu untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebanyak 5 dokumen	823.189.000	Tersusunnya Dokumen (Analisis PDRB, Analisis ICOR, Analisis Makro ekonomi DIY, Dokumen Analisis Kualitas Pembangunan dan Tingkat Kesejahteraan Daerah, Dokumen Analisis Data Kinerja Daerah & Perangkat Daerah) dan selesai tepat waktu untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebanyak 5 dokumen	905.508.000	Tersusunnya Dokumen (Analisis PDRB, Analisis ICOR, Analisis Makro ekonomi DIY, Dokumen Analisis Kualitas Pembangunan dan Tingkat Kesejahteraan Daerah, Dokumen Analisis Data Kinerja Daerah & Perangkat Daerah) dan selesai tepat waktu untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebanyak 5 dokumen	4.054.098.000	BPPSD DIY	DIY	
			Penyajian Informasi dan Data Statistik	1. Update aplikasi : Joga dataku 2. Update aplikasi : Geoportal DIY 3. Forum Data dan Simpul Jaringan	N/A	N/A	N/A	1. 2 aplikasi: a. Pengembangan	728.346.500	1. Update Aplikasi Jogiadataku &	780.000.000	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan	856.204.000	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan	941.825.000	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan	2.737.772.500	BPPSD DIY	DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					4. Update dan verifikasi data statistik 5. Update dan verifikasi data geospasial 6. DIY Dalam Angka				n interface, manajemen data dan alat analisisnya. b. Pengembangan fungsi dasar geoportal dengan layout standart, pengembangan fungsi mobile device, pengembangan panduan pemanfaatan geoportal secara interaktif 2. Laporan pembaruan data		Aplikasi Geoportal DIY 2. Forum data dan simpul jaringan		terlaksananya Forum Data dalam rangka memberikan layanan informasi sebanyak 2 aplikasi dan 1 forum data		terlaksananya Forum Data dalam rangka memberikan layanan informasi sebanyak 2 aplikasi dan 1 forum data		terlaksananya Forum Data dalam rangka memberikan layanan informasi sebanyak 2 aplikasi dan 1 forum data			
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	447.662.000	100 %	390.387.350	100 %	838.049.350	BPPSD DIY	DIY
					2. Persentase Perencanaan yang Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	71,00%		72,00%		72,00%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Dukungan 100 % terhadap Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan 100% dan Tingkat kepuasan pelanggan 71%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	447.662.000	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	390.387.350	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	838.049.350	BPPSD DIY	DIY
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1. Dokumen Analisis ICOR Sektoral DIY sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 2. Dokumen Analisis Makro Ekonomi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 3. Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian 4. Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian 5. Update Aplikasi Dataku 6. Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik 7. Pengumpulan dan Penyajian Data Geospasial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 aplikasi 6. 1 paket 7. 1 paket 8. 1 dokumen Jogja Dataku 7.1 paket konten data geospasial 8.1 dokumen 9.1 dokumen 10.1 dokumen 11.1 dokumen 12. 1 aplikasi	447.662.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 aplikasi 6. 1 paket 7. 1 paket 8. 1 dokumen	390.387.350	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 1 aplikasi 6. 1 paket 7. 1 paket 8. 1 dokumen	838.049.350	BPPSD DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					8.Fasilitasi Satu Data Indonesia: Dokumen Proyeksi Data 9.Kajian Transformasi Ekonomi DIY (Kajian Perubahan Struktur Ekonomi DIY untuk pondasi paradigma baru pembangunan DIY) 10.Kajian Ketimpangan Kesempatan Penduduk dalam mengakses pelayanan dasar di DIY 11.Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 12.Update Aplikasi Geoportal															
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah	N/A	N/A	-	60%	500.000.000	70%	480.000.000	90%	1.189.455.000	100%	1.350.475.000	100%	3.215.724.000	BPPSD DIY	
				Penelitian Pembangunan Daerah	1. Dokumen hasil penelitian	N/A	N/A	N/A	N/A	1. Dokumen grand design tema penelitian (1 dokumen) 2. Dokumen hasil-penelitian yang terpilih (1 dokumen)	400.000.000	Tersusunnya Dokumen rekomendasi hasil penelitian yang terjamin mutunya sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen	600.000.000	Tersusunnya Dokumen rekomendasi hasil penelitian yang terjamin mutunya sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen	700.000.000	Tersusunnya dokumen untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	1.423.360.000	BPPSD DIY	DIY	
				Penyelenggaraan Jejaring Penelitian Pembangunan Daerah	1. Inventarisasi hasil penelitian Tahun n 2. Rekomendasi hasil penelitian Tahun n 4. Laporan Monitoring evaluasi hasil litbang	N/A	N/A	N/A	N/A	1. Forum jejaring penelitian (1 forum) 2. Rekomendasi hasil penelitian yang terjamin mutunya (1 dokumen)	80.000.000	Tersusunnya Dokumen rekomendasi hasil penelitian yang terjamin mutunya sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen	589.455.000	Tersusunnya Dokumen rekomendasi hasil penelitian yang terjamin mutunya sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen	650.475.000	Tersusunnya Dokumen rekomendasi hasil penelitian yang terjamin mutunya sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen	1.292.364.000	BPPSD DIY	DIY	
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	318.721.770	100%	264.281.000	100%	583.002.770	BPPSD DIY	DIY	
				Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dukungan 50 % terhadap Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	97.049.000	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial dan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	66.508.000	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial dan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	163.557.000	BPPSD DIY	DIY	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												PD penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Akhir Tahun			
							Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Dokumen hasil penelitian dengan tema sosial : Ketimpangan Pertumbuhan Antar Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen hasil penelitian dengan tema pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19 1 dokumen	47.819.000	1 dokumen hasil penelitian	33.254.000	1 dokumen hasil penelitian	81.073.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen hasil penelitian dengan tema budaya : Menuju DIY sebagai Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	33.254.000	1 dokumen	33.254.000	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen hasil penelitian dengan tema : perwujudanvisi DIY sebagai pusat pariwisata terkemuka tahun2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	49.230.000	N/A	N/A	1 dokumen	49.230.000	BPPSD DIY	DIY
				Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dukungan 25 % terhadap Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	221.672.770	Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	197.773.000	Terlaksananya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	419.445.770	BPPSD DIY	DIY
				Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1. Rekomendasi hasil penelitian tahun 2022 2. Inventarisasi hasil penelitian tahun 2022 3. Laporan monitoring evaluasi kelitbangan tahun 2022 4. Rumusan bahan kebijakan kelitbangan 5. Publikasi Prosiding Ilmiah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 100 eksemplar	221.672.770	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 100 eksemplar	188.060.000	1. 1 dokumen 2. 1 dokumen 3. 1 dokumen 4. 1 dokumen 5. 100 eksemplar		BPPSD DIY	DIY

## BAB 7

### KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Bappeda DIY memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan pokok dan pencapaian tujuan pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 75 dan 99 Tahun 2018 yang diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Di sisi lain, Bappeda DIY masih menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan perencanaan. Sementara selama ini masih terdapat kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ditetapkan dengan pencapaiannya.

Merujuk pada hal tersebut, maka dalam rangka mengurangi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, ditetapkan indikator kinerja utama Bappeda DIY adalah persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7-1 berikut:

**Tabel 7-1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun0	Tahun1	Tahun2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	83%	83,50%	84,00%	84,50%	85,00%	85,50%	85,50%

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah dihitung dari jumlah indikator sasaran perangkat daerah tahun Nyang tercapai dibagi total jumlah indikator sasaran

perangkat daerah di RPJMD dikalikan 100%. Indikator kinerja utama tersebut berangkat dari kondisi kinerja pada tahun 2018 sebesar 83,5% dan ditargetkan untuk mencapai 85,50% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa diharapkan kesenjangan antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan akan semakin menyempit dari tahun ke tahun.

## **BAB 8**

### **PENUTUP**

#### **A. Catatan Penting**

Renstra Bappeda DIY tahun 2017-2022 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Bappeda DIY. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi muatan Renstra Bappeda DIY termasuk indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

#### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan Renstra Bappeda DIY 2017-2022 merupakan penyempurnaan dari Rancangan Akhir Perubahan Renstra Bappeda DIY 2017-2022, dan disusun berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 050/8300 tanggal 27 April 2021 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2017-2022. Penyesuaian Perubahan Renstra dilakukan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran, yaitu :

- 1) Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil pembahasan di dalam Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 (dibuktikan dengan Berita Acara rangkaian forum Musrenbang RKPD Tahun 2022)
- 2) Program, kegiatan dan subkegiatan tersebut menunjang capaian program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2017-2022
- 3) Nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan beserta tolok ukurnya sesuai dengan hasil pemetaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

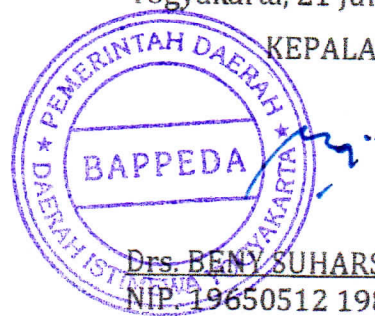


### C. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Renstra Bappeda DIY tahun 2017-2022 merupakan acuan bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.

Yogyakarta, 21 Juni 2021

KEPALA



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.  
NIP. 19650512 198602 1 002



BAPPEDA DIY  
Komplek Kepatihan Danurejan

